



Pemberdayaan Masyarakat

Sejak diluncurkan tahun 2007 di Palu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik untuk masyarakat di perdesaan maupun di perkotaan. Bahkan program ini di klaim berhasil menekan angka kemiskinan, karena program-programnya langsung menyentuh permasalahan dasar dalam kehidupan masyarakat luas. Misalnya membangun sarana infrastruktur desa, seperti jalanan, jembatan, sanitasi bahkan penyediaan air bersih, sehingga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat yang kian membaik.

Sujana Royat, Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, mengapresiasi berbagai keberhasilan yang dicapai PNPM Mandiri. "Tapi, masih ada kelemahan dan kekurangan bahkan juga penyimpangan," paparnya pada acara Rapat Nasional Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri, Mei lalu. Untuk itu diharapkan peran dan dukungan para Kepala Daerah/Bupati/Walikota dan ketua DPRD untuk ikut memonitor pelaksanaan PMPM Mandiri.

Selain itu, untuk mengoptimalkan peran program tersebut maka perlu adanya pengaturan antara pemerintah

pusat dan daerah dalam hal penyediaan dana dan pengelolaannya, atau yang disebut DDUB (dana daerah untuk urusan bersama). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan dan memperkokoh komitmen bersama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri.

Selain mengabarkan tentang Rakernas PNPM Mandiri itu, Redaksi juga menurunkan berita seputar Rapat Koordinasi tentang ketenaga kerjaan yang diprakarsai oleh Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan. Rakor yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2 bulan yakni Mei dan Juni itu dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga, sebagai rangkaian dari Rencana Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja yang akan dilakukan pemerintah.

Untuk berita ringan kali ini, kami menurunkan artikel tentang budidaya "si buah cinta" atau strawberry, di mana buah ini sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno sebagai lambang dewi cinta. Sedangkan dalam rubrik Budaya kami menyajikan seputar Festival I La Galigo, yaitu kisah peradaban masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat dan Selamat Membaca. ■

Pelindung :
Wakil Presiden RI

Penasehat :

- Seswapres RI
- Deputy Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan
- Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa

Penanggung Jawab :
Kepala Sekretariat TNP2K

Pemimpin Redaksi :
Hamka Kurniawan

Staf Redaksi :
Lukman Ajis Salendra

Tata Letak / Artistik :
Sujarwadi

Alamat Redaksi:
Sekretariat TNP2K,
Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4
Jalan Kebon Sirih No. 35
Jakarta Pusat 10110
Telp. : 021-3912812
Fax. : 021-3912511, 3912513
Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

Daftar Isi

Laporan Utama



Penanggulangan Kemiskinan Prioritas Utama Pembangunan Nasional

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengujian lapangan. Program ini juga sebagai salah satu instrumen utama percepatan penanggulangan kemiskinan di tanah air.

U... (text partially obscured)

3

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Program ini juga sebagai salah satu instrumen utama percepatan penanggulangan kemiskinan di tanah air.

PNPM MANDIRI Jakarta, 31 Mei 2012



Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Di awal tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku pemimpin Timbulnya Rahmat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2012) mengungkapkan bagaimana pentingnya upaya mendorong peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

9

Di awal tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2012) mengungkapkan bagaimana pentingnya upaya mendorong peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.



Tantangan yang dihadapi PNPM Mandiri

Sesuai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 lalu, PNPM Mandiri telah banyak menuai keberhasilan. Banyak kisah sukses PNPM Mandiri telah banyak menuai keberhasilan. Banyak kisah sukses PNPM Mandiri telah banyak menuai keberhasilan.

"A... (text partially obscured)

14

Sejak diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 lalu, PNPM Mandiri telah banyak menuai keberhasilan. Banyak kisah sukses PNPM Mandiri yang membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Namun dibalik itu masih ada juga kelemahan dan kekurangannya.



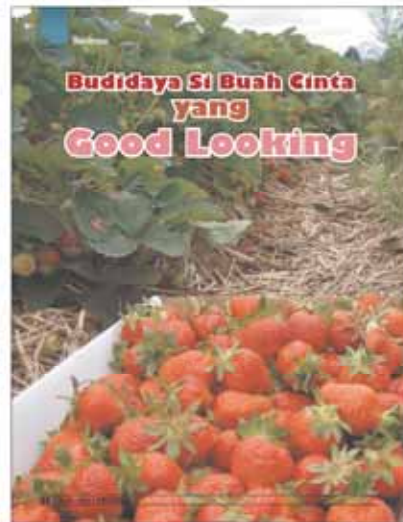
Laporan Rakor 2012

Menakar Ketenagakerjaan Melalui Lima Pilar Rencana Aksi

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah kronis yang menghambat laju pembangunan serta kemiskinan bangsa. Masalah ini sejatinya dipicu oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya serapnya lapangan kerja bagi pencari kerja yang semakin banyak. Pemenuhan ekonomi ini sebagai prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan. Fasilitas dalam bentuk program kerja harus maksimal, terutama ada upaya dan modal kerja yang diharapkan sebagai instrumen dan atau program kerja penanggulangan kemiskinan.

19

Penanggulangan kemiskinan kini telah menjadi fokus program di berbagai kementerian. Kementerian Sosial misalnya telah menancangkan program bedah kampung untuk menanggulangi kemiskinan. Dan di tahun 2012 ini ada 1.000 rumah yang direhabilitasi oleh Kemensos di seluruh Indonesia.



44 Rendezvous

Buah cinta ini bernama strawberry atau stroberi. Termasuk buah yang "good looking" alias sedap dipandang mata. Bentuknya unik, persis seperti bentuk hati. Warna buahnya bila sudah matang merah merona.



Wakil Menteri Keuangan, Dr. Anny Ratnawati memberikan sambutan

PROGRES - IWAN H

Penanggulangan Kemiskinan Prioritas Utama Pembangunan Nasional

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Program ini juga sebagai salah satu instrumen utama percepatan penanggulangan kemiskinan di tanah air.

Untuk mengoptimalkan peran PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja di daerah, maka perlu adanya penguatan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah terutama dibidang pendanaan. Diperlukan adanya pengaturan penyediaan dan tata cara pengelolaan dana urusan bersama pusat dan daerah, khususnya untuk PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan agar tertib sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Berangkat dari semangat itu, kemarin (31/5/2012) Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal



Wakil Menteri Keuangan, Dr. Anny Ratnawati memukul gong tanda dibukannya kegiatan rakernasw.

Perimbangan Keuangan) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan "Rapat Kerja Nasional Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan Program PNPM Mandiri".

Acara yang diselenggarakan di Jakarta tersebut, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Dr. Anny Ratnawati. Menghadirkan narasumber yang membahas berbagai kebijakan seputar PNPM Mandiri dan Penanggulangan Kemiskinan. Diantaranya Dirjen Perimbangan Keuangan, Dr. Marwanto Harjowiryo MA, yang memaparkan makalahnya tentang Pokok-pokok Kebijakan Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan PMK

168/PMK.07/2009 dan PMK 54/PMK.07/2012. Kemudian, Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Bambang Widianto yang membawakan paparannya tentang Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya paparan tentang Kebijakan Umum PNPM Mandiri, dibawakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, Dr. Ir. Sujana Royat DEA.

Kegiatan itu dihadiri oleh lebih dari 1.080 peserta dari daerah antara lain Bupati dan Walikota, Ketua DPRD seluruh Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala

Dinas PU seluruh Indonesia dan *stake holder* program PNPM Mandiri, baik perkotaan maupun perdesaan.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati dalam pidato pembukaan acara tersebut mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Bahkan penanggulangan kemiskinan menempati urutan ke 4 dari 11 prioritas pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu negara. "Penanggulangan kemiskinan mempunyai implikasi luar biasa kepada sosial, politik, keamanan dan kekokohan suatu bangsa dan negara," jelas Anny.



Untuk itu alokasi anggaran program kemiskinan harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun agar dapat menekan angka kemiskinan serendah mungkin. Pada tahun 2006, alokasi anggaran untuk kemiskinan mencapai 46,6 triliun dengan jumlah masyarakat miskin sekitar 17,8 persen. Tiga tahun berikutnya yakni tahun 2009, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 14,2 persen dengan total alokasi anggarannya mencapai 80,1 triliun. Sedangkan ditahun 2012 ini, alokasi anggaran tersebut meningkat menjadi 99,2 triliun dengan target jumlah masyarakat miskin 10,5 – 11,5 persen. Secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia

mengalami penurunan secara signifikan.

Namun demikian Anny mengingatkan, kita tidak boleh lupa bahwa jumlah penduduk kita juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga program penurunan kemiskinan juga harus diikuti dengan penurunan jumlah orang atau penduduk yang hidup dalam kemiskinan, tidak hanya dalam sisi persentase.

Diingatkan juga bahwa sesuai dengan target MDGs tahun 2015 nanti jumlah penduduk miskin harus sudah berada pada posisi 7,5 persen. Jadi, kemiskinan harus bisa ditekan lagi 3 sampai 4 persen dalam tiga tahun kedepan. Artinya, kata Anny, kita harus betul-betul mempunyai kesiapan,

baik dalam program, konsistensi, juga sinergi antar program kemiskinan.

Terkait dengan sinergitas antar program itu, data Bank Dunia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki program-program kemiskinan yang lengkap. Dicontohkan oleh Anny, adanya klaster 1 program kemiskinan yang dianalogikan dengan memberikan ikan. Klaster 2 dengan memberikan kailnya, dan klaster 3 menyiapkan perahunya. Bahkan dalam klaster 4, masyarakat disediakan perumahan murah, kendaraan murah.

"Pertanyaannya adalah bagaimana sinergi dalam program tersebut, bagaimana sinergi antar program, sehingga



Khusus untuk PNPM Mandiri, Wamen memaparkan bahwa BLM (bantuan langsung masyarakat) melalui PNPM Mandiri pada tahun 2007 dikururkan sebesar Rp.3,9 triliun. Dengan perimbangan yang sama antara PNPM Perkotaan maupun Perdesaan yakni Rp.1,9 triliun. Sedangkan di tahun 2012, alokasinya sudah naik menjadi 9,4 triliun rupiah. Jadi hampir mendekati 3 kali dari alokasi di 2007, dimana kita lihat fokusnya ada di perdesaan lebih besar sekitar 8 triliun dan perkotaan 1,4 triliun.

penurunan kemiskinan bisa kita percepat dengan kualitas yang makin tinggi," kata Wakil Menteri Keuangan, Dr. Anny Ratnawati.

Menyinggung hal tersebut, dia menjelaskan bahwa negara memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan program baru, karena hampir 85 persen APBN merupakan anggaran yang sudah terikat. Misalnya anggaran untuk belanja pegawai, alokasi pendidikan 20 persen,

pembayaran utang dan bunga utang negara. dan subsidi BBM. "Oleh karena alokasinya terbatas maka penguatan program, efisiensi, efektifitas pelaksanaan program harus kita dorong," paparnya.

Wamen juga menjelaskan tentang dampak dari krisis ekonomi eropa dan negera-negara besar lainnya terhadap perekonomian di tanah air dalam waktu dekat. "Biasanya

yang paling rentan kalau ada goyangan di dalam ekonomi adalah kelompok miskin," katanya. Untuk itu diharapkan program-program kemiskinan harus segera dijalankan baik di pusat maupun di daerah. Dan pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan dana DDUB untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

Khusus untuk PNPM Mandiri, Wamen memaparkan bahwa BLM (bantuan langsung masyarakat) melalui PNPM Mandiri pada tahun 2007 dikururkan sebesar Rp.3,9 triliun. Dengan perimbangan yang sama antara PNPM Perkotaan maupun Perdesaan yakni Rp.1,9 triliun. Sedangkan di tahun 2012, alokasinya sudah naik menjadi 9,4 triliun rupiah. Jadi hampir mendekati 3 kali dari alokasi di



2007, dimana kita lihat fokusnya ada di perdesaan lebih besar sekitar 8 triliun dan perkotaan 1,4 triliun. "Ini menandakan bahwa kemiskinan kita sebagian besar ada di perdesaan, dan juga sebagian besar berada disektor pertanian," katanya. Untuk itu dia berharap PNPM Mandiri Perdesaan khususnya disektor pertanian ini harus diperkuat dan di sinergikan. sehingga upaya pengentasan kemiskinan bisa menjadi lebih cepat.

Sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan program PNPM Mandiri ini juga tak lepas dari upaya menjaga *clean governance*. Karena pada pasal 3 Undang-undang 17 tahun 2003, dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Artinya setiap program harus berbasis performance, dan harus disiapkan pelaporannya. "Pelaporan adalah kunci bagi kita untuk melakukan monitoring dan evaluasi" jelasnya. Jadi untuk PNPM Mandiri ini, azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik tetap harus dipegang dan dijadikan landasan untuk bekerja.

Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah

Dalam Undang-undang 32 tahun 2004 dijelaskan penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi menjadi dua. Ada kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Di

kewenangan pusat ada 6 urusan absolut ditambah 6 urusan di luar absolut. Di kewenangan daerah ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Implikasi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah adalah juga pada alokasi anggarannya. Ada yang menjadi kewenangan pusat dalam APBN, ada yang menjadi kewenangan daerah di dalam APBD tetapi ada juga yang menjadi kewenangan bersama. Artinya ada alokasi dalam APBN dan ada alokasi dalam APBD. Contohnya adalah program PNPM Mandiri, dimana pemerintah daerah juga harus mengalokasikan dana pendamping.

Dasar hukum pendanaan urusan bersama pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan :

- Perpres 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Perpres 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dibahas mengenai penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dua Perpres ini sebetulnya menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan adalah urusan dan tanggung jawab bersama pusat dan daerah. Untuk itu ada alokasi APBN dan ada alokasi APBD. Kemudian diturunkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 168, PMK 07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan

Kemiskinan. Ini adalah legal aspek untuk penyediaan dana pendamping. Ini memang khusus untuk PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan dan ini juga menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan dan melaksanakan penyaluran bantuan serta melaporkan pertanggungjawaban dari PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan.

PMK baru terkait indeks fiskal dan kemiskinan daerah, mencoba menangkap keterbatasan kapasitas daerah tetapi pada saat yang bersamaan memberikan insentif kepada daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Misalnya kalau ada daerah yang indeks fiskalnya atau kemampuan fiskalnya rendah

tetapi dalam penanggulangan kemiskinan kriteria indeks yang dicapai pengurangan kemiskinan tinggi maka daerah tersebut akan diberikan insentif. Insentifnya adalah persentase dana urusan bersama (DDUB) untuk pendampingan menjadi lebih rendah yang menjadi tanggung jawab daerah, dan tanggung jawab pusat menjadi lebih tinggi. Jadi maksudnya untuk daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah maka tidak fair juga kalau diberi tanggung jawab besar, karena kemampuannya terbatas. Tetapi dengan kemampuan fiskal terbatas tidak harus mengurangi kecepatan untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu fairness kita kombinasikan antara kemampuan fiskal dan insentif di sisi lain. ***iwhk.



PNPM MANDIRI

Jakarta, 31 Mei 2012



Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Di awal tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2012) mengungkapkan bagaimana pentingnya upaya mendorong peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Presiden memaparkan dua alasan mengapa peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan penting bagi Pemerintah Indonesia.

“**P**ertama, walaupun angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun, kenyataannya tahun ini masih di atas sepuluh persen. Tentu kita harus lebih bersemangat agar di tahun-tahun mendatang lebih turun lagi. Itu realitas pertama,” kata Presiden.

Kedua, kata Presiden, gejolak perekonomian global memiliki dampak terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Krisis global dapat menyebabkan inflasi meningkat. Harga energi dan pangan pun terancam meroket. “Kenaikan harga pangan dan energi langsung menghambat penanggulangan kemiskinan. Juga kita saksikan di banyak negara, termasuk negara-negara maju, gejolak perekonomian itu menciptakan pengangguran baru. Kalau itu terjadi di negara berkembang, ada inflasi pangan dan energi, ada *new unemployment*, dan hampir pasti kemiskinan akan meningkat,” kata Presiden.

Maka dari itu, Presiden me-

ngatakan, pemerintah akan terus melakukan percepatan dan perluasan ekonomi, sembari mengurangi angka kemiskinan. Tak hanya Indonesia, negara-negara yang tergabung pada G-20 juga melakukan upaya yang sama.

Selaras dengan itu, pada Rapat Kerja Nasional Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri 31 Mei 2012 di Jakarta, Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K juga menegaskan terkait masalah kemiskinan dalam paparannya bertajuk Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Di awal paparannya ia menjelaskan gambaran tingkat atau angka kemiskinan. Target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2014 yang optimis diharapkan turun menjadi 8 persen atau yang moderat angka kemiskinan turun menjadi 10 persen. Seperti ditegaskan Bambang Widianto bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan itu bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan daerah di mana daerah sebagai

sasaran yang menjadi ujung tombak untuk penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks itu, masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan karena 2/3 dari konsumsi mereka adalah pada konsumsi pangan sementara golongan lain lebih terpengaruh pada kenaikan bahan bakar (BBM). Dibutuhkan percepatan penanggulangan kemiskinan di mana Maret 2009 sampai Maret 2010 ternyata 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan. Sayangnya sebagaimana ditegaskan Bambang 13,2 juta penduduk miskin kembali ke garis kemiskinan dengan *net* atau perhitungan 1,5 juta penduduk keluar dari kemiskinan.

Bahwa kemiskinan itu sangat dipengaruhi oleh bahan makanan dan hampir 70 persen dipengaruhi bahan pangan dan 30 persen oleh beras. Faktor-faktor yang membentuk garis kemiskinan di antaranya beras. Menyangkut bahan pokok beras akan sangat signifikan terhadap masalah kemiskinan. Ditengarai bisa anjlok lagi kemiskinan gara-gara harga beras yang tak terkendalikan.

Oleh karena itu perlu menjaga stabilitas harga pangan terutama menjaga harga beras termasuk mensukseskan program bantuan sosial semisal Raskin dan distribusinya, sebagai kunci penurunan kemiskinan. “Sangat penting menjaga harga pangan di masing-masing daerah,” tegas Bambang Widianto.

Ada 4 Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Nasional yaitu

1. Menyempurnakan Program Perlindungan Sosial yang mencakup bantuan sosial berbasis keluarga, bantuan kesehatan bagi keluarga miskin dan bantuan





pendidikan bagi masyarakat miskin;

2. Meningkatkan Akses Rumah Tangga Miskin terhadap Pelayanan Dasar mencakup pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih;
3. Pemberdayaan Masyarakat yaitu menyempurnakan pelaksanaan PNPMD Mandiri; dan
4. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas atau "Inclusive Growth" menyangkut UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja, Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur), Pembangunan perdesaan dan pembangunan Pertanian.

Empat strategi itu sebagaimana ditegaskan Bambang Widianto akan terkait dengan suatu orientasi perubahan Program Penanggulangan Kemiskinan di mana pada masa lalu tidak terdapat Program Penanggulangan Kemiskinan yang langsung disasarkan kepada penduduk miskin. Selain itu pada waktu dulu juga strategi penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pertumbuhan ekonomi secara luas, dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur perdesaan. Memang pendekatan berorientasi pertumbuhan itu telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia, banyak penduduk miskin tidak menikmati hasil pembangunan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kebijakan untuk melindungi penduduk miskin dalam merespon setiap guncangan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan, pendekatan pemerintah terhadap orientasi perubahan program penanggulangan kemiskinan memang telah berubah, dari program yang lebih mengandalkan pertumbuhan, kepada program yang lebih mengedepankan program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran. Demokrasi dan keterbukaan menempatkan kemiskinan menjadi sebagai salah satu isu penting. Program-program penanggulangan kemiskinan saat ini lebih bersasaran dan pemerintah berupaya untuk mengembangkan sistem jaminan sosial.

Ditengarai juga mengenai orientasi perubahan program penanggulangan kemiskinan periode sebelum krisis di mana hampir semua program kemiskinan tidak bersasaran yaitu menyangkut pemberian subsidi secara umum. Selain itu pembangunan perdesaan seperti BIMAS, KUK, pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah secara masif yang kemudian menjadi program bersasaran berdasarkan region atau IDT.

Selama periode krisis program perlindungan sosial lebih bersasaran tapi masih bersifat reaktif, seperti: Program Padat Karya, Raskin, bantuan kesehatan dan pendidikan untuk rumah tangga miskin. Dan semua program ditujukan untuk menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga miskin tidak mengalami penurunan.

"Salah satu yang menjadi faktor pendorong perubahan orientasi program penanggulangan kemiskinan di antaranya menyangkut kenaikan harga minyak Internasional. Subsidi dan Listrik menghilangkan kesempatan untuk membangun bidang-bidang lain yang lebih *pro* orang miskin, seperti pembangunan kesehatan,

pendidikan, perlindungan sosial bersasaran dan infrastruktur. Dan ternyata juga Subsidi BBM tidak *pro* orang miskin. Orang kaya pun masih ada yang mendapatkan subsidi dari BBM itu," kata Bambang Widianto.

Ditegaskan Bambang Widianto orientasi program-program penanggulangan kemiskinan yang bersasaran sangat penting dilakukan. Didasarkan pada argumentasi kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005. Dan penghematan BBM harus digunakan untuk pembiayaan program seperti program *Unconditional Cash Transfer*, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur perdesaan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan perkembangan, pendekatan pemerintah terhadap orientasi perubahan program penanggulangan kemiskinan memang telah berubah, dari program yang lebih mengandalkan pertumbuhan, kepada program yang lebih mengedepankan program-program penanggulangan kemiskinan bersasaran.

Empat alasan mengapa dibutuhkan sistem perlindungan sosial:

1. Kemiskinan dinamis;
2. Kompensasi untuk kelompok rentan apabila terjadi perubahan kebijakan;
3. Strategi promosi untuk kelompok miskin agar memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain; dan
4. Melindungi kelompok miskin dan rentan terhadap

"goncangan ekonomi".

Alternatif Sistem Penargetan agar program penanggulangan kemiskinan itu programnya sejatinya bersasaran maka diperlukan *means-testing* artinya keperluan data berkualitas sehingga pelaksanaannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak semua negara memiliki data sasaran dengan metode ini. Indonesia salah satu negara yang memiliki data sasaran dengan metode ini. Basis Data Terpadu berdasarkan PPLS 2011. Alternatif lain adalah *Geographical targeting*, bantuan diberikan

Terkait dengan hal itu, sebagai data informasi bahwa yang tercakup ke dalam kelompok rentan yaitu pertama kelompok Sangat Miskin, Miskin dan Dekat Miskin. Kedua, kelompok Anak Yatim dan Anak Jalanan. Ketiga, Tunawisma tanpa dukungan. Keempat, Komunitas Suku Terpencil. Dan kelima, Pengungsi.

kepada individu yang tinggal di daerah dengan kriteria tertentu. *Community-based targeting* yaitu metode menggunakan struktur komunitas untuk mengidentifikasi anggota rumah tangga miskin berdasarkan kriteria yang disepakati. Alternatif lainnya adalah memberikan bantuan kepada kelompok rentan yang memiliki keterbatasan tertentu dan kemudian juga diperlukan *self-targeting* yakni program dengan kompensasi di bawah harga pasar, sehingga hanya mereka yang membutuhkan akan mengikuti program tersebut.

Terkait dengan hal itu, sebagai data informasi bahwa yang tercakup ke dalam kelompok rentan yaitu *pertama* kelompok Sangat Miskin, Miskin dan Dekat Miskin. *Kedua*, kelompok Anak Yatim dan Anak Jalanan. *Ketiga*, Tunawisma tanpa dukungan. *Keempat*, Komunitas Suku Terpencil. Dan *kelima*, Pengungsi.

Prioritas

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan yang mitranya di daerah adalah TKPKD mempunyai prioritas program yang bersasaran. Prioritas itu menyangkut Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional; menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan program keluarga harapan; integritas program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM; dan bagaimana mengembangkan peta jalan sistem keuangan inklusif untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

"Bagaimana data itu seragam di seluruh Indonesia, itu gampang-gampang susah," kata Bambang. Negara di Eropa sekarang mengalami krisis termasuk di Amerika yang terus menyempurnakan program sosial di mana isu utamanya apakah dua atau tiga tahun ke depan bisa menjalankan program kesehatan. Program ini sangat pelik.

Berkaitan dengan itu, ada instrumen utama penanggulangan kemiskinan di mana Program yang disasarkan ini adalah rumah tangga yaitu Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga termasuk klaster 1. Selanjutnya Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas atau klaster 2 dan klaster 3 yakni program penanggulangan kemiskinan

berbasis Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagaimana dijelaskan Bambang Widianto, untuk keberhasilan dari Program Penanggulangan Kemiskinan secara bersasaran diperlukan adanya unifikasi suatu Sistem Penetapan Sasaran Nasional atau dengan kata lain perlunya Basis Data Terpadu. Sistem Penetapan Sasaran Nasional adalah suatu sistem penetapan sasaran keluarga yang berhak mendapatkan program perlindungan atau jaminan sosial dari pemerintah pusat dan daerah. Suatu sistem penargetan dikatakan efektif apabila mampu secara tepat mengurangi *exclusion error* dan *inclusion error*. Bahwa keberadaan suatu basis data yang *unified* akan memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial.

Keberadaan suatu Basis Data Terpadu terkait dengan ketepatan sasaran langsung dari program perlindungan sosial yang dijalankan. Basis Data Terpadu itu sendiri sumber utamanya dari PPLS 2011 berisikan nama dan alamat 40 per sen rumah tangga di Indonesia dengan kondisi kesejahteraan terendah. Prinsip Dasar dari penggunaan Basis Data Terpadu sebagai strategi Nasional menyangkut fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan unit intervensi program individu, keluarga maupun RT. Menyangkut juga fleksibel dalam mengakomodasi kriteria kepesertaan program berdasarkan status kesejahteraan, lokasi administrasi dan status demografis. Prinsip dasar itu menyangkut juga pengukuran status kesejahteraan berdasarkan metode ilmiah, kriteria yang *comparable* dengan mengakomodasi kondisi lokal, dan kelengkapan informasi dasar. Bahwa Basis Data Terpadu itu pun dapat diakses secara luas oleh

program dengan memperhatikan privasi informasi individu, keluarga dan rumah tangga.

"Selama dua tahun terakhir TNP2K mengembangkan data bersama BPS yaitu menyusun sistem penetapan sasaran. Yang survei BPS dengan berbagai macam kriteria lalu dikirim kepada kami untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu untuk bantuan sosial. Metodologi diperbaiki. Data sekarang jauh lebih baik dibandingkan data-data sebelumnya walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Untuk mendapatkan data tersebut tidak dipungut biaya tetapi memang ada mekanismenya karena menyangkut data individu," kata Bambang.

Selanjutnya Bambang Widiyanto menjelaskan mengenai PKH (Program Keluarga Harapan) di mana dibutuhkan penguatan kelembagaan terutama kelembagaan di daerah sebagai ujung tombak. PKH ini ditargetkan sampai 2014 tiga juta rumah tangga dan tahun ini baru mencapai 1,5 juta rumah tangga.

Mengenai Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Bambang Widiyanto mengatakan bahwa untuk tahun ini akan menggunakan kartu alias tidak lagi berbasis sekolah. Kartu tersebut akan dikirim via pos yang data dan alamat si penerimanya diambil dari Basis Data Terpadu. Dengan menggunakan Basis Data Terpadu itu sebagai mekanisme baru dalam rangka memperbaiki sasaran dan program. Menyangkut jumlah dan ketepatan waktu ditengarai jangan sampai uang BSM dicairkan setelah tahun ajaran baru tetapi mestinya sebelum tahun ajaran baru berlangsung. Paling tidak hal itu untuk menyikapi orang miskin yang tidak bisa bayar registrasi sekolah jadinya kemudian bisa bayar dengan bantuan uang

BSM tersebut.

Paling tidak diusulkannya penggunaan mekanisme baru penetapan sasaran penerima dalam konteks penyaluran BSM diharapkan lebih tepat sasaran dengan menjangkau anak dari keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan yakni 30 persen penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Diharapkan juga dapat menjangkau mereka yang tidak bersekolah dan mendorong orangtua untuk menyekolahkan

lebar. Mayoritas bersumber APBD. Portabilitas yang sangat terbatas, kesulitan ketika harus dirujuk ke Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten atau Kota. Rasio klaim relatif tinggi karena persepsi kinerja sesuai penyerapan dana.

Oleh karena itu dibutuhkan *Grand Design* penyempurnaan sistem layanan kesehatan di antaranya menyangkut ketersediaan, distribusi, kualitas fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan; sistem layanan kesehatan yang terstruktur dalam arti berjenjang dan menggunakan



anaknyanya.

Dalam konteks Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Bambang Widiyanto mengatakan memang itu program bagus tetapi masalahnya menyangkut keberlangsungan program tersebut atau sustainabilitasnya. Jamkesda berkembang lebih berlatar belakang politis. Jumlah peserta sedikit sangat berisiko dalam pengelolaan keuangannya atau distribusi risiko. Besaran premi tidak dihitung berbasis aktuarial. Variasi paket manfaat sangat

sistem rujukan; Standar Nasional Layanan Medis; dan perubahan perilaku hidup Sehat. Selain *Grand Design* juga dibutuhkan peta jalan Jamkesda untuk integrasi ke BPJS Kesehatan.

"Kalau kita bisa berkonsentrasi pada setiap program ini dengan baik, sasarannya tepat, mekanisme programnya tepat Insya Allah penurunan kemiskinan akan berjalan jauh lebih cepat dari pada yang berjalan sekarang," kata Bambang Widiyanto mengakhiri paparannya. ■



Tantangan yang dihadapi PNPM Mandiri

Sejak diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 lalu, PNPM Mandiri telah banyak menuai keberhasilan. Banyak kisah sukses PNPM Mandiri yang membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Namun dibalik itu masih ada juga kelemahan dan kekurangannya.

“Ada banyak keberhasilan, ada banyak kisah sukses, tapi masih ada kelemahan dan kekurangan bahkan ada juga penyimpangan dana”, ungkap Sujana Royat, Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinasi Bidang Kesra, dalam paparannya pada acara Rapat Nasional Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri, Mei 2012 lalu di

Jakarta.

Menurutnya ada dua tantangan yang dihadapi PNPM Mandiri saat ini. Pertama adalah meminimalisir bahkan memberantas penyimpangan dana ditingkat masyarakat, baik yang dilakukan oleh pengurus BKM, UPK, dan juga fasilitator PNPM Mandiri. Yang kedua adalah menjaga adanya tekanan politik untuk mengubah PNPM Mandiri yang diarahkan ke desa-desa konstituennya oleh para elit politik. “Dan ini kami tidak ada

toleransi bagi penyimpangan maupun tekanan politik terhadap PNPM Mandiri,” tegas Sujana.

Sesuai arahan presiden, kata Sujana, bahwa PNPM Mandiri tidak boleh dikaitkan dengan politik apapun. Bahkan Wakil Presiden Boediono dalam Rakernas Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan 2012, Maret lalu menegaskan kepada seluruh Menteri pengelola PNPM Mandiri, bahwa PNPM ini harus dijaga, ditingkatkan efektifitasnya



karena bisa untuk mengantisipasi dampak krisis yang mungkin akan terjadi. Sehingga proses percepatan penyaluran ini harus disampaikan, jangan dikaitkan dengan politik apapun, pilkada apapun, jelasnya.

Saat ini pelaksanaan program PNPM Mandiri sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan dan desa di Indonesia. Dipaparkan Sujana bahwa lebih dari 4600 kecamatan sudah terjangkau oleh program tersebut, bahkan dari 76 ribu lebih desa yang ada di Indonesia, 72 ribu desa diantaranya sudah menikmati manfaat program PNPM Mandiri. Untuk itu dia menghimbau kepada seluruh Bupati, Walikota dan Ketua DPRD yang hadir pada acara tersebut untuk mendukung sekaligus memonitor jalannya pelaksanaan PNPM Mandiri di daerahnya masing-masing. "Jadi 85 persen lebih daerah di Indonesia sudah ada PNPM Mandiri," kata Sujana.

Terkait masalah penyaluran dana PNPM Mandiri di perdesaan, dalam evaluasinya ditemukan masih banyak UPK (unit pengelola kegiatan) dan BKM (badan keswadayaan masyarakat) di daerah yang masih menyimpan dana PNPM Mandiri. Hampir 15 persen dari jumlah UPK yang ada diseluruh Indonesia memegang dana yang angkanya lebih dari Rp. 2 milyar. "Ini artinya ada dana yang tidak sampai ke masyarakat", ungkap Sujana. Untuk itu dia berharap bagi UPK, BKM dan unit kegiatan lain untuk segera menyalurkan dananya kepada masyarakat. "Dengan demikian ada proses perguliran, dan dana itu sampai kepada masyarakat," tambahnya.

Dalam evaluasi selanjutnya, Sujana menitik beratkan pada masalah kelembagaan. Menurutnya kelembagaan-

kelembagaan PNPM Mandiri harus diperkuat. Karena disitulah kekuatan PNPM Mandiri, bukan pada uangnya. Ada beberapa butir kebijakan yang akan memperkuat PNPM kedepan. Pertama adalah masalah governance. Didalam governance itu ada upaya untuk anti korupsi, dan anti penyimpangan dana PNPM. Tidak hanya di PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan tapi juga di 10 PNPM lainnya baik itu yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga, atau PNPM sektoral, atau juga PNPM yang didanai dari lembaga donor yang memberikan hibah, seperti PNPM Peduli untuk kelompok rentan, ada PNPM yang lainnya seperti PNPM Generasi, PNPM Hijau atau PNPM Green. Mengacu pada arahan Wapres bahwa PNPM harus bersih dari penyimpangan dana. Meskipun saat ini tingkat korupsinya berada di bawah 1%. Wapres berharap PNPM menjadi program nasional yang bisa dibanggakan oleh semua pihak. Oleh karena itu dukungan bupati, walikota sangat diharapkan agar dapat memonitor pelaksanaan PNPM di daerahnya masing-masing. Selain itu program PNPM Mandiri saat ini sudah menjadi model program pemberdayaan masyarakat di 33 negara. Negara-negara tersebut meniru dan mengadaptasi pola PNPM Mandiri yang ada di Indonesia.

Sujana Royat juga menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar dana dari PNPM Mandiri digunakan untuk pembangunan fisik. "Hampir 70 persen dana BLM itu untuk pembangunan fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi kurang dari 30, sisanya adalah untuk kegiatan sosial. Untuk itu sesuai arahan Wapres, bahwa dana untuk pemberdayaan ekonomi ini ditambah atau ditingkatkan," kata Sujana.

Untuk menyempurnakan peran PNPM sebagai program pemberdayaan untuk masyarakat, maka ke depan akan disusun peta jalan (*road map*) PNPM Mandiri. Ada dua tujuan yang menjadi dasar untuk menyusun peta jalan PNPM Mandiri. Pertama adalah rencana aksi perkuatan PNPM Mandiri 2012 hingga 2014, dimana diharapkan PNPM Mandiri nantinya akan bisa terus dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya sebagai suatu sistem pemberdayaan yang cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua adalah bagaimana mengembangkan PNPM Mandiri dengan peran daerah yang lebih ditingkatkan. Jadi ada langkah

"Hampir 70 persen dana BLM itu untuk pembangunan fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi kurang dari 30, sisanya adalah untuk kegiatan sosial. Untuk itu sesuai arahan Wapres, bahwa dana untuk pemberdayaan ekonomi ini ditambah atau ditingkatkan."

desentralisasi PNPM Mandiri, kata Sujana.

Peta Jalan (Road Map) PNPM Mandiri

Peta jalan PNPM Mandiri diperlukan untuk merumuskan dengan jelas masa depan dan berbagai strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah dan masyarakat bagi keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Ada 5 komponen yang menjadi fokus dari peta jalan PNPM Mandiri tersebut.

Pertama adalah Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat.



Agar rencana pembangunan yang disusun masyarakat melalui lembaga/kelompok yang telah didampingi PNPM Mandiri tidak menjadi eksklusif, maka hasil perencanaan lembaga/kelompok masyarakat di suatu desa/kelurahan perlu diintegrasikan dengan perencanaan desa/kelurahan (satu desa/kelurahan - satu perencanaan). Selanjutnya kegiatan di tingkat desa/kelurahan dapat diakomodir dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten/kota).

Kedua adalah Keberlanjutan Pendampingan.

Salah satu unsur keberhasilan PNPM Mandiri terkait erat dengan fasilitasi dan pendampingan masyarakat yang efektif (fasilitator). Untuk itu perlu diperkuat kapasitas dan kompetensi pendamping masyarakat sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat serta pengakuan terhadap profesi dan kinerja untuk mewujudkan kewirausahaan sosial.

Ketiga adalah Penguatan

Kelembagaan Masyarakat.

Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh program-program pemberdayaan masyarakat memerlukan penguatan dalam kapasitas dan status hukumnya. Tujuannya agar lebih efektif dalam melayani sebanyak mungkin warga miskin. Kemudian juga penyelenggaraan kegiatannya itu secara hukum terlindungi, dan dana yang dikelolanya aman, akuntabel. Selanjutnya ada kepastian keberlanjutan dan berkembang melalui kerjasama dengan kelembagaan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ini diperlukan guna menghindari resiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan oleh pemerintah selama ini.

Keempat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah.

Tujuannya mendorong peningkatan peran pemerintah daerah tidak saja akan mengurangi beban pemerintah pusat, melainkan sekaligus memperkuat kapasitas dan kualitas pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan umumnya dan program pemberdayaan masyarakat khususnya, pemerintah pusat perlu secara bertahap mengalihkan berbagai dukungan serta pengeloan program kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah diharapkan mampu berinisiatif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan wilayahnya.

Kelima, adalah Perwujudan Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Tata kelola yang baik, transparan, akuntabel sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak mentolerir berbagai tindak penyimpangan dana dan korupsi dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Perbaikan tata kelola dan anti korupsi sendiri merupakan bagian integral dalam susunan prinsip, mekanisme dan pelaksanaan PNPM Mandiri dengan berbagai hasil keluaran yang bervariasi di berbagai lokasi.

Berdasarkan evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, implementasi kebijakan mengenai tata kelola dan anti korupsi membutuhkan peningkatan yang terus menerus, mulai dari pengelola tingkat pusat hingga daerah, mulai dari tenaga pendamping hingga pelaku di berbagai lembaga masyarakat, dan yang tujuan paling akhir adalah terinternalisasinya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi kelompok masyarakat itu sendiri. ■ Iw/dbS

Mengapa Diperlukan Peta Jalan (road map) PNPM Mandiri

Peta jalan PNPM Mandiri (PNPM Road Map) diperlukan untuk merumuskan dengan jelas masa depan dan berbagai strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah dan masyarakat bagi keberlanjutan program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Naskah usulan peta jalan disusun sejak bulan Agustus 2011 oleh kelompok kerja yang terdiri atas Pokja Kebijakan Klaster II (TNP2K) bersama Sekretariat Pokja Pengendali (Kemenko Kesra) yang telah melakukan berbagai kajian dan konsultasi dengan unsur pemerintah, pelaku dan masyarakat secara umum.

Terdapat 3 sasaran penting dalam penyusunan naskah Peta Jalan ini yaitu, pertama tersusunnya arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk keberlanjutan; kedua, tersusunnya standar proses dan contoh praktek yang baik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan, dan yang ketiga adalah tersusunnya strategi koordinasi antar klaster dan program guna memperkuat keberlanjutan lembaga masyarakat yang mandiri, akuntabel, serta



peran pemerintah daerah dan masyarakat secara umum.

Dengan memakai pendekatan pokok yakni melakukan transformasi pemberdayaan dari sebuah program menjadi sebuah gerakan sosial, naskah usulan peta jalan menetapkan tiga capaian berkesinambungan yakni capaian berupa masyarakat BERDAYA (meningkatnya *community participation*) menuju masyarakat MANDIRI (berkembangnya *community institution*) dan tujuan akhir berupa masyarakat yang MADANI (terciptanya *communitiy engagement*).

Peta jalan membutuhkan seperangkat sarana untuk dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, disusunlah Langkah Kebijakan Pelaksanaan Peta Jalan PNPM Mandiri (*PNPM Road Map Action Plan*) berupa serangkaian usulan kebijakan yang dinilai paling strategis untuk memastikan ter-

jadinya capaian program pemberdayaan masyarakat yang berdaya, mandiri dan madani sebagaimana yang dituangkan dalam naskah berikut ini.

Acuan utama dalam menyusun langkah kebijakan (*action plan*) ini adalah arahan Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai keberlanjutan PNPM Mandiri (Maret, 2012) yang menjadi pedoman pokok dalam menjabarkan 5 (lima) pilar kebijakan dalam naskah usulan Peta Jalan PNPM Mandiri. Pilar pertama menyangkut Integrasi Program Pemberdayaan di Indonesia. Pilar Kedua mengenai Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Pilar Ketiga terkait dengan Peningkatan dan Keberlanjutan Pendampingan Masyarakat. Pilar Keempat mengenai Penguatan Peran Pemerintah Daerah. Dan terakhir, Pilar Kelima mengenai Perwujudan Tata Kelola Peme-



rintah (*Good Governance*) dalam Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Arahan Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.

1. PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional mengenai pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menciptakan aset bagi kelompok masyarakat miskin.
2. Kriteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah; (i). Adanya partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam penyelenggaraan program, (ii). Ditandai oleh penyediaan alokasi dana secara langsung ke masyarakat, dan yang (iii)

Penyelenggaraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.

3. Ketiga kriteria tersebut akan mendorong menguatnya modal sosial (kohesi, saling percaya dan semangat gotong royong), lembaga sosial yang kuat dan akuntabel (UPK, BKM, BumDes) serta penguatan akses bagi masyarakat (layanan dasar, informasi, keuangan) yang menjadi prasyarat tercapainya masyarakat mandiri, maju dan sejahtera.

Harapan dan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat 4 harapan pokok yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat di

Indonesia yaitu:

- Menanggulangi Kemiskinan; program pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia.
- Mendorong Pembangunan yang Inklusif; program pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi kelompok marjinal, terutama di daerah-daerah tertinggal.
- Layanan Publik yang Akuntabel; program pemberdayaan masyarakat memperkuat sistem penyaluran layanan masyarakat yang transparan dan akuntabel di wilayah kerjanya.
- Penguatan Kapasitas Lokal; program pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan modal sosial dan kapasitas berbagai lembaga di tingkat lokal. ■



Laporan Rakor 2012

Menakar Ketenagakerjaan Melalui Lima Pilar Rencana Aksi

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat suatu komunitas bangsa. Masalah ini sejatinya dipikulkan pada pundak kebersamaan bagaimana dalam aksinya menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan angkatan kerja secara lebih terarah. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan publik sejatinya menjadi motor sekaligus fasilitator dalam konteks pencapaian suatu program secara maksimal. Sejatinya ada upaya dan usaha kerja keras yang ditunjukkan sebagai trobosan dan atau progresivitas penyelesaian masalah ketenagakerjaan.



Ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan lebih tepatnya kemajuan baik dari segi kebijakan maupun program. Sejak Indonesia merdeka yang ditandai dengan Proklamasi 45 di Jalan Pegangsaan Timur oleh Soekarno Hatta, jaman Orde Baru yang ditandai kepemimpinan Soeharto dan Orde Reformasi ditandai tahun 1998, masalah ketenagakerjaan memang menjadi isu penting yang bahkan sensitivitasnya sangat tinggi terkait wacana perburuhan dan implementasi kebijakan program-program di pemerintahan.

Rakor 21 Mei 2012

Pada Rapat Koordinasi 21 Mei 2012 di Auditorium Sekretariat

Wakil Presiden dengan bahasan "Kerangka Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja," mengemuka lima hal yang harus dibangun sebagai pilar-pilar rencana aksi, sebagaimana dipaparkan Bambang Widianto, Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Lima Pilar sebagai Rencana Aksi itu yaitu:

- 1) Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan;
- 2) Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Angkatan Kerja;
- 3) Pengembangan UMKM;
- 4) Program Padat Karya dan

Infrastruktur; dan

- 5) Program Darurat Penciptaan Lapangan Kerja.

Menakar berarti mengukur sejauh mana dan bagaimana langkah-langkah konkret ke depan. Seperti *sharing* forum pada Rapat Koordinasi tersebut dalam rangka mewujudkan pilar-pilar rencana aksi penciptaan lapangan kerja yang sebelumnya setiap dari *draft* dari berbagai kementerian yang terkait dengan rencana aksi ketenagakerjaan tersebut dipresentasikan di depan Wapres.

Di awal paparannya Bambang Widianto pada Rakor tersebut menyinggung sedikit masalah latar belakang pentingnya Rapat Koordinasi di mana Presiden yang sangat peduli terhadap lapangan kerja kemudian



dimintakan kepada Wapres untuk mengkoordinasikannya. "Jadi untuk yang pagi hari ini, memang Presiden sangat koncern mengenai penciptaan lapangan kerja, tapi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah Penciptaan Lapangan Kerja yang dilakukan atau dibiayai oleh APBN. Jadi bahwa sebetulnya di APBN ini banyak sekali dikeluarkan uang untuk yang berkaitan dengan, *pertama* penciptaan lapangan kerja, *kedua* yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pekerja itu sendiri. Ini semua kementerian hampir punya," jelasnya.

R encananya memang sesuai intruksi Wapres dalam waktu 1-2 minggu ke depan akan ada Rapat Koordinasi para Menteri mengenai Kerangka Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja dan

Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja. Pembahasan dalam Rakor adalah program-program penciptaan lapangan kerja yang dibiayai APBN, yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Program-program tersebut perlu ditingkatkan efektivitasnya. Peserta rapat diminta untuk menyiapkan paparan dari tiap Menteri pada Rapat Koordinasi dengan Wapres tersebut, untuk menyelaraskan Program yang semuanya harus tercakup ke dalam Lima Pilar Rencana Aksi.

"Di berbagai Kementerian itu ada banyak sekali program-program yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas angkatan kerja. Dan ini hasilnya masih

kurang efektif. Jadi ini diminta Pak Wapres untuk berkoordinasi bagaimana kita mempertajam program-program yang kita klaim, yang di Kementerian itu punya judul Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja," tegas Bambang.

Pada Rakor yang dipimpin Bambang Widianto itu memang fokus pembahasan penyiapan paparan Menteri yang akan disampaikan di hadapan Wapres terkait program ketenagakerjaan supaya koordinatif, tidak ada yang bertentangan apa yang disampaikan satu Menteri dengan yang disampaikan Menteri lainnya.

Rakor sebagai Rencana Aksi tersebut bertujuan untuk menajamkan program-program



penciptaan lapangan kerja yang ada di Kementerian dan Lembaga tanpa mengubah alokasi anggaran dan membuat program baru atau membentuk kelembagaan baru.

Sebagaimana dipaparkan Bambang Widianto di atas, ada Lima Pilar yang dijadikan titik tekan pembahasan yaitu mengenai Layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang masuk sebagai Pilar 1 satu yang agendanya di antaranya meningkatkan kualitas bursa tenaga kerja Disnaker Kabupaten dan Kota. Di Negara lain ada standar minimum Bursa Tenaga Kerja, yaitu ada sistem pendaftaran menyangkut standarisasi pencatatan informasi pencari kerja, pencatatan lowongan kerja, standarisasi lembaga kepelatihan dan pencarian kerja mandiri. Ada

analisis pasar kerja, ada usaha mempertemukan pencari dan pemberi kerja, dan ada layanan pasar tenaga kerja termasuk program pendampingan, bimbingan karir dan sebagainya.

Pilar 2 yaitu terkait Peningkatan Keterampilan dan Keahlian. Terkait Pilar 2 perubahan yang dilakukan adalah sesuatu yang bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Dengan tidak perlu ada usulan perubahan Undang-Undang, sebab itu terlalu lama, tegas Bambang Widianto.

"Diambil yang lebih singkat, misalnya melibatkan swasta dalam penyusunan standar kompetensi, supaya kita bisa selalu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai standar industri. Dunia usaha juga perlu diminta *mentranslate* apa yang mereka

kerjakan di pabrik/tempat kerjanya ke dalam sebuah standar. Dan ini selalu harus *update* untuk sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dari standar itu kita bisa dibuat standar kompetensi, dan sertifikasi kompetensi, yang akan membantu para pengusaha dan investor, dalam menghitung dan menilai berapa lama pelatihan yang diperlukan untuk memastikan tenaga kerja bisa siap pakai," jelas Bambang.

Juga perlu meningkatkan SMK. Memang ada yang sudah papan atas, namun masih banyak juga yang harus diperbaiki sesuai standar industri. SMK yang non unggulan tentu ada keterbatasan, perlu dibantu. Perlu dibuat balai kejuruan untuk membantu SMK yang belum punya alat-alat yang baik. Kurangnya insentif



dan informasi tentang pelatihan individu, harus ditanggulangi. Perlu diadakan perbaikan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi. Perlu dibuat forum keterampilan untuk memperbaiki SKKNI. Perlu ditingkatkan standar minimum kemampuan BLK. Meningkatkan SMK-nya sendiri dalam hasil SDM, peralatan dan kerjasama dengan industri.

"Kita ingin melakukan pelatihan yang sifatnya *Demand Driven* bukan *Supply Driven*. *Demand Driven* sesuai permintaan industri. Contoh, pelatihan untuk juru kamera yang ada di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Peralatannya sudah jauh ketinggalan, jadi lulusan Radio Dalam tidak bisa langsung dipakai di studio TV, harus di-*training* lagi," kata Bambang.

Pilar 3 yaitu menyangkut Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan. Program tersebut memerlukan semacam program penguatan pelatihan kewirausahaan, layanan peningkatan usaha (*Business Development Service*) dan dukungan bagi wirausaha pemula untuk mengakses KUR.

Pilar 4 terkait Pembangunan Infrastruktur Berbasis Komunitas. Titik fokus aksi Pilar ini diarahkan kepada pengangguran usia muda yang ternyata besar sekali.

"Mengenai *Skema Pilot Integrated Program* untuk Kaum Muda, kita harus punya *employment services center* (bursa tenaga kerja) untuk melihat bakat-bakat pemuda yang mendaftar. Kita lihat bakatnya, apakah jadi wirausaha atau bukan," tegas Bambang

Widiyanto.

Selanjutnya pada Rakor untuk sesi pembuatan *draft* rencana paparan untuk para Menteri diasistensi oleh Cheppy dan Arie Perdana. Cheppy menengarai Rakor kali ini sebagai wujud nyata dari koordinasi. Sementara itu Arie Perdana menyampaikan paparan mengenai dan cara membuat rencana paparan untuk Menteri sesuai dengan tiga dokumen yang dilampirkan.

Pada Rakor tersebut muncul beberapa permasalahan yang dibawa dari Kementerian seperti permasalahan yang disampaikan dari Kementerian Koperasi di mana ia pun ingin memanfaatkan Rakor untuk mempertajam program tetapi tidak harus merevisi APBN.

Salah satu fokus Kementerian



Pekerja di pabrik tekstil

Koperasi adalah mengurangi pengangguran. Dalam beberapa tahun belakangan ini Kementerian Koperasi berkordinasi dengan sektor-sektor khususnya membangun mentalitas *entrepreneur* di UMKM dan generasi muda. Ada 55,2 juta orang, tetapi mereka ini belum tentu *entrepreneur* asli. Bisa saja hanya terpaksa, atau meneruskan usaha orangtuanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beban pemerintah di antaranya mendorong munculnya tenaga trampil dari kalangan generasi muda, atau mendorong mereka menjadi *entrepreneurship*.

Dari Kementerian Koperasi itu lebih jauh menengarai bahwa *entrepreneurship* merupakan fokus bersama dalam arti tidak hanya Kementerian Koperasi saja bagaimana meningkatkan *entrepreneurship* di kalangan pelaku UMKM yang jumlahnya

55,2 juta itu.

"Kalau ini ditingkatkan, nanti satu unit usaha saja bisa menyerap tenaga kerja 1 sampai 10 orang. Kita harus bisa mengoptimalkan peran UMKM. Kementerian Koperasi punya infrastruktur dan Balai Latihan Kerja di daerah-daerah. Kami pada 2011 memperoleh slot dalam sistem alokasi anggaran. Kami dapat 150 milyar untuk menyentuh UMKM. Tetapi tidak bisa kami salurkan ke daerah, sebab institusi yang ada di daerah kita sudah lepas kita berikan ke otonomi daerah, sehingga mereka tidak bisa direvitalisasi. Untungnya kami juga dapat dana pelatihan dari APBN untuk meningkatkan kemampuan UKM. Oleh karena itu, bila dimungkinkan kami ingin *brainstorming*. Menurut hemat kami, ini lebih *pas* kalau program besarnya Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan. Jadi tidak

mesti harus pelatihan saja. Sebab kita sudah punya sasaran 55,2 juta itu. Kita juga bisa mengoptimalkan institusi dan bidang usaha yang bisa langsung menyerap tenaga kerja. IKOPIN ingin kita dorong menjadi pusat pengembangan vokasi," katanya.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih banyak menyoroti masalah *demand side* dari *supply side* terutama peningkatan kehidupan nelayan. "Memang antara lapangan kerja dan *supply* harus kita dekatkan. tidak bisa menerapkan *open system*. Kami sudah bekerjasama dengan beberapa Kementerian, pengalaman di lapangan itu adalah penyampaian *target group*. Misalnya Kementerian Koperasi tadi punya 55,2 juta UKM, kami yakin pasti 6 juta di antaranya adalah dari nelayan. Di sektor itu, kami menetapkan wilayah dan potensi alam, baru

kami memberikan *support* untuk usahanya. Jadi kami lihat wilayahnya, modalnya, baru pemainnya didata. Kami ada integrasi antara SMK, balai latihan, pelaku bisnis dan Kementerian kami, misalnya bahwa kapal ikan dari Kementerian Kelautan dan Koperasi harus nahkodanya dari sekolah maritim”.

Ila Saila dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Dikti yang hadir pada Rakor itu menyoroti masalah kerangka kualifikasi Indonesia yang Perpresnya sudah terbit pada tanggal 17 Januari 2012. “Masalah uji kompetensi, kami sedang merumuskan bahwa 7 profesi kesehatan seperti dokter dan sebagainya, akan diuji kompetensi sebelum mereka lulus. Kita ingin memberikan tanggung jawab lebih kepada Fakultas, jangan asal cetak ijazah tetapi juga harus meningkatkan kualitas. Dan kami sedang membuat sistem informasi relevansi dunia pendidikan dan dunia usaha.”

“Terakhir kami sering bertemu dengan para kepala sekolah, mereka anggap dunia usaha kurang ramah terhadap balai latihan siswa. Akan baik kalau para siswa bisa magang di dunia usaha,” tandasnya.

Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan bahwa BNSP didirikan untuk menjadi jembatan antara penghasil tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. “Kalau saya membaca rencana aksi ini saya sangat kagum, karena ditulis ingin meningkatkan *capacity building* BNSP. Tetapi saya rasa *capacity building* itu bukan cuma menyisihkan anggaran. Justru yang dibutuhkan adalah kewenangan lebih misalnya koordinasi dan komunikasi,” tegasnya.

Dalam paparannya ia men-

contohkan terkait masih banyaknya Kementerian yang membuat balai latihan sendiri, dan tidak terkait BNSP. “BNSP memang tidak akan melaksanakan sendiri, tetapi punya sistem pengendalian dan koordinasi.”

Selanjutnya BNSP minta kejelasan mengenai otoritas sertifikasi di mana ia meminta agar semua sertifikasi baik industri atau apa saja, tetap harus mengacu pada sistem sertifikasi Nasional. Berikutnya dari BNSP menyampaikan tentang bagaimana peranan

facturing. “Kami sudah melakukan langkah-langkah di Pilar 1. Tetapi di Pilar 1 cuma sampai pengembangan ketrampilan. Kami di Jawa Tengah sudah mengadakan pelatihan untuk bidang tekstil, sampai dengan 2012 ini sudah mau melatih 7000 orang lagi, dan semuanya terpakai. Investasi yang masuk ke Jawa Tengah sangat terbantu dengan tenaga kerja dari kami. Di sektor lain misalnya Kimia, kami membuat *center of excellence*. Karena di industri besar bukan cuma pelatihan saja tapi juga *transfer of technology*.”



Pekerja di pabrik tekstil

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai amar dari UU Ketenagakerjaan No 13 di mana untuk mengawinkan antara dunia usaha dan dunia pendidikan, yang menyertifikasinya adalah BNSP.

Sementara itu dari Pendidikan Dasar menyoroti masalah *supply side* pendidikan yang terkait Pilar 4 yaitu pembangunan infrastruktur agar standarnya segera diperjelas.

Dari Direktorat *Manufacturing* Kementerian Perindustrian menyoroetri terkait bidang *manu-*

Dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian menyampaikan beberapa hal terkait Program Sarjana Membangun Desa (SMD). “Kami sudah merekrut sampai 2.300 sarjana yang kita beri pekerjaan, tiap sarjana didukung 10 masyarakat sekitar, jadi ada 23.000 lapangan kerja yang tercipta. Kelompok-kelompok yang tercipta ini sudah dipercaya perbankan dan memperoleh kredit,” katanya.

Dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyoroti masalah kontribusi TKI untuk pembangunan yang dianggapnya sudah baik. "Kami ingin agar TKI yang sudah kembali ke Indonesia tidak perlu keluar lagi, lebih baik berwirausaha di Indonesia saja," tegasnya.

Dari Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja menyoroti masalah kesulitan di Direktoratnyanya di mana tidak berfungsinya Dinas Tenaga Kerja di Daerah. "Pertama, kendala kami adalah pengantar kerja yang berpindah-pindah. Mohon dihimbau di Daerah agar pengantar kerja difungsikan seperti pengawas, yang harus dibekali pengetahuan berbagai sektor. Kesulitan kami ini tentang pengakuan pengantar kerja, minta agar *grade*-nya dinaikkan sebagai pengawas. Kedua, mengenai kewirausahaan, mohon agar sasaran-sarannya tidak *overlapping*. Mungkin bisa di petakan agar kami bisa mencapai target-target

kami mengingat instansi-instansi lain juga membuat program yang serupa. Terakhir adalah masalah Padat Karya, mohon dikawal supaya roh/filosofi Padat Karya itu jangan hilang".

Dari Deputi BPPT Bidang Pendidikan Dasar menyoroti ketertarikan terhadap *Demand* di mana ke depannya nanti akan dikembangkan ketenagakerjaan berdasarkan *Demand*. "Kami harap program-program Nasional kita ini bisa dijadikan pusat perkembangan industri yang nantinya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan. Kami sedang mengembangkan mobil murah. Kami harap ini bisa menjadi wahana kita bukan sekadar membuat mobil tetapi lebih jauh lagi untuk mengembangkan industri mobil demi penciptaan lapangan kerja. Kami senang Seswapres mengambil koordinasi ini."

Dari Kementerian Informasi dan Komunikasi memaparkan

bahwa di Kementeriannya punya program SIM TKI. "Kalau berangkat dari Pilar 1, SIM TKI bisa dikembangkan jadi SIM Tenaga Kerja. Bisa dikembangkan program aplikasinya dan datanya. Kami punya Direktorat Sumber Daya Pos dan Informatika, kami sudah lama menyelenggarakan pelatihan Radio Operator Maritim. Jadi semua pelaut harus punya pelatihan dan kami kerjasama dengan Departemen Perhubungan. Patokan kami tiap tahun 5000 lulusan baru dan ini berstandar Internasional."

Di akhir sesi, dari Kementerian Koperasi mengatakan bahwa di Kementerian Koperasi isu yang penting adalah bagaimana Kementerian Koperasi melakukan revitalisasi pasar tradisional yang jumlahnya 13.450 pasar lebih 17 persen dalam keadaan sangat sederhana.

Terkait permasalahan maupun paparan yang disampaikan

dari tiap Kementerian dan kelembagaan itu, Bambang Widianto memberikan jawaban dan arahnya secara pragmatis dan praktis dan lugas di mana pada intinya semua paparan nantinya harus terkait pada Lima Pilar Rencana Aksi.

Di akhir Rakor Bambang Widianto mengingatkan di mana TNP2K memiliki data rumah tangga terbawah sebagai acuan data yang sejatinya dipakai oleh tiap Kementerian dan Lembaga yaitu Basis Data Terpadu.

Rakor 5 Juni 2012

Sebagai tidak lanjut Rakor 21 Mei 2012, maka pada 5 Juni 2012 digelar kembali Rapat Koordinasi mengenai Rencana Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja yang bertempat di Seswapres RI. Rapat tersebut sedianya masih dalam konteks penyusunan presentasi dari tiap Kementerian agar setiap program yang akan diselenggarakan menyangkut ketenagakerjaan tidak keluar dari Lima Pilar Rencana Aksi.

"Kita tidak membuat program baru lagi tetapi mempertajam program yang sudah jalan dan sudah ada anggarannya," ujar Bambang Widianto selaku Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Sekretaris Eksekutif TNP2K.

Mengawali Rakor Bambang Widianto memberi waktu kepada Sekjen dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan paparan terkait 5 Pilar Program Rencana Aksi. "Ini sedikit informasi tentang profil pekerja kita. Kita bandingkan antara 2010 dibanding 2011. Di sini kita melihat mayoritas pekerja kita lulusan SD, kemudian SMP dan selanjutnya sampai PT. Yang unik adalah yang diploma paling rendah, diikuti lulusan S-1 Universitas dan selanjutnya. SMK

malahan 8.9 persen. Memang kita punya program terkait kelompok 2 yaitu peningkatan keterampilan angkatan kerja. Kita akan mengembangkan akademi komunitas dan program-program vokasi, ini relevan dengan butir kedua," jelasnya.

Selain itu juga Sekjen Depdikbud memaparkan mengenai tingkat Pengangguran Terbuka. Ada data-data mengenai tingkat pengangguran pada masing-masing jenjang pendidikan dan ditengarai lulusan Universitas menurun.

Dalam pada itu Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto menanggapi paparan tersebut, "Untuk Dikbud, kita identifikasi ada di Pilar 2 yaitu Peningkatan Keterampilan dan Keahlian. Standar kompetensi kita sekarang belum merefleksikan standar Industri. Kita renungkan saja, bahwa standar kita belum sesuai standar industri. Kita akan ketinggalan dari negara lain kalau standar kompetensi belum sesuai dengan standar industri. Jadi harus kita perbaiki."

Bambang mengharapkan juga ada perbaikan standar untuk Kementerian dan Lembaga lain menyangkut misalnya kurangnya kerjasama dengan industri dan swasta. Permasalahannya justru kesulitan dari industri itu sendiri dalam menerjemahkan apa yang dikerjakan di pabrik ke dalam suatu standar pendidikan. "Jadi baik Kementrian, Lembaga dan kalangan industri harus kerja sama-sama untuk menciptakan proses sertifikasi kompetensi. Demikian juga Balai Latihan Kerja kita, belum berbasis kompetensi. Bagaimana cara kita meningkatkan BLK kita agar optimal dan sesuai standar kompetensi," imbuhnya.

Terkait Pilar 2, menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

selalu ada *mis-match* antara hasil BLK pemerintah dan apa yang dibutuhkan swasta sebagaimana dikutip Bambang Widianto.

Untuk peningkatan standar harus ada institusi atau semacam forum di mana swasta dan pemerintah bisa dialog sama-sama untuk memperbaiki standar. Harus ada juga perbaikan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi. Standar BLK, SMK, Balai Kejuruan dan lain-lain semuanya harus dibenahi. Misalnya memberikan *voucher* pelatihan dan dana pelatihan.

Terkait Pilar 3 adalah Pe-

"Di Kementerian dan Lembaga ini banyak yang mengklaim meningkatkan tenaga muda. Sebetulnya kalau benar-benar punya program seperti itu, tidak bisa anak muda langsung dijadikan wirausaha. Harusnya ada *Employment Service Center*. Jadi bisa dipilah sesuai dengan kemampuan, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi wirausaha."

ngembangan UKM dan Kewirausahaan, ada 3 unsur yaitu penguatan program pelatihan kewirausahaan, layanan peningkatan usaha dan dukungan bagi wirausaha pemula untuk mengakses KUR. "Kita harus memperbaiki unsur-unsur tersebut dengan meningkatkan keterlibatan swasta. Kita masih belajar, dan kita sadar harus memperbaiki diri. Di USA saja pelatihan-pelatihan ini belum sepenuhnya berhasil. Tapi ini *best practices*. Kita harus membuat langkah-langkah kongkrit," tegas Bambang.

Selain itu, di Kementerian dan Lembaga banyak yang

mengklaim meningkatkan tenaga muda. "Sebetulnya kalau benar-benar punya program seperti itu, tidak bisa anak muda langsung dijadikan wirausaha. Harusnya ada *Employment Service Center*. Jadi bisa dipilah sesuai dengan kemampuan, ada yang jadi pekerja, dan ada yang jadi wirausaha," jelas Bambang Widiyanto meyakinkan.

Sementara itu dari Sekjen Kementerian Koperasi terkait kerangka aksi Nasional penciptaan lapangan kerja khususnya mengenai UKM mengusulkan agar KUR-nya diperluas tak hanya KUR tapi juga akses ke pembiayaan. "Sebab ada hal-hal yang di luar kendali Kementerian dan Lembaga kami, ada yang di luar. Misalnya KUR, itu di luar kendali kami sebab memakai ekonomi pasar. Untuk pelatihan kewirausahaan kami sudah meningkatkan peran sektor swasta dalam desain serta pelaksanaan program. Kami selalu akan melibatkan ABG alias Akademisi, Businessman dan Government dalam pengembangan kewirausahaan. Kami menggunakan KISME - Koordinasi Integrasi Sosialisasi *Monitoring Evaluation*," katanya.

Usulan target yang disampaikan dari Sekjen Kementerian Koperasi termasuk Pendampingan UMKM untuk mengakses KUR, Perpindahan Progresif ke Kegiatan Outsourcing yang Kompetitif dan Program-Program UKM lainnya seperti Revitalisasi Pasar Tradisional, Penataan K-5, UKM Mart, Kantin Sekolah.

Dari Dirjen Pembinaan dan Pelatihan menengarai forum sangat baik untuk koordinasi antar Kementerian. "Kami berkeyakinan kalau dikumpulkan seluruh pelatihan di Indonesia, semua pasti mengaku sukses, padahal kenyataan lain. Karena di daerah ada ahli pelatihan, ahli



untuk dilatih, tetapi menghasilkan *redundancy* dan *overlapping*. Maka harus ada pengumpulan data yang bagus sampai ke tingkat dasar agar pengembang program yang baik bisa menemukan angka penganggur yang *real*," ujarnya.

Senada dengan itu dia minta dukungan yaitu pemberdayaan pelatihan di perusahaan-perusahaan di mana masih *underutilized*. Bisa memberdayakan sebagai contoh *carrefour* lokal dan *carrefour* internasional."

Ia menganggap hal itu masih berupa pekerjaan rumah (PR) terkait 5 Pilar dan yang lainnya sudah dilaksanakan. Adapun mengenai masalah standar, banyak BLK dan SMK masih kekurangan dana sehingga sulit memenuhi standar. "Kalau bisa harus ada UU, regulasi pengangkatan dan penempatan PNS untuk mengatur penempatan guru dan instruktur. Kalau tidak begitu nanti begitu naik pangkat langsung kabur," ungkapny.

"Kami butuh dukungan selain dana BLK, juga pemagangan butuh bantuan agar perusahaan mau buka pintu. Kalau yang besar-besar sudah bisa, yang menengah

masih susah. Mohon dibantu agar perusahaan mau menerima pemagangan, dibantu dengan kebijakan. Kami mempunyai Program Desa Produktif. Kita cek *resources* di desa tersebut lalu dibantu oleh Kementerian-Kementerian," katanya.

Selanjutnya dari kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti masalah pendataan dari pelaku usaha, dan registrasi ulang untuk *training for providers*. Yang tujuannya adalah standar kompetensi nasional secara lintas sektor.

"Kami sudah bekerjasama dengan Nakertrans dan UKM bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki layanan informasi ketenagakerjaan. Kami juga menyelenggarakan *Job Fair* KKP, juga bursa kerja *online* kerjasama dengan Nakertrans dan Kedubes Jepang. Untuk Pilar 2 kami sudah menyiapkan fokus kepada Sertifikasi, di mana dewan penyempurnaan sertifikasinya bukan cuma dari kami tetapi juga ada wakil dari industri. Kami juga bekerjasama dengan Dikbud. Kami punya program pelatihan kewirausahaan, peningkatan *business development support*. Be-



kerjasama dengan pihak swasta. Tahun ini ditargetkan akan ada 300 sentral pelatihan. Kami juga sudah menyiapkan program darurat untuk penciptaan lapangan kerja."

Dari Dirjen Komunikasi dan Informasi menyampaikan mengenai salah satu tugas Kominfo adalah regulasi industri dan mengenai meningkatkan komputer literasi. Penyerapan tenaga kerja sektor TIK di mana terlihat sektor *Software* tumbuh pesat.

"Di masa depan akan tumbuh tiga hal: *Network, Content and Service*. Ini harus diatur oleh Kebijakan dan Regulasi. Ini adalah peluang buat lapangan kerja di dalam industri baru yang memungkinkan muncul *entrepreneur* di bidang ini. Kami sedang mengembangkan SIM TKI bekerjasama dengan Kemenakertrans. Kami akan menyiapkan jaringan dan *training-training* untuk operasionalnya. Kami sudah menyiapkan juga untuk teknologi lain misalnya *Auditor TI*. Peningkatan keterampilan juga ada sekolah-sekolah *Broadcasting*. Ini punya prospek yang baik dan butuh

sertifikasi Diknas untuk S1-nya. Kami sampai sekarang masih dipercaya untuk training operator radio (REOR) dan sudah diakui Lembaga Internasional."

Dari Dirjen BNP2TKI menyampaikan di mana BNP2TKI sangat terkait Pilar 1, 2 dan 3. "Adapun kontribusi kami dalam Pilar 1 adalah telah membuat info kerja luar negeri berbasis web. Di Pilar 2 yaitu peningkatan tenaga keluar negeri melalui fasilitasi akses ke lembaga pendidikan dan pelatihan.

Dirjen Kementerian Perindustrian menyampaikan masalah pengangguran di Indonesia dan proyeksi pertumbuhan industri dari 2012 sampai 2014. "Kami sudah mempunyai Penyiapan Tenga Kerja Siap Pakai. Ada sekolah-sekolah bertaraf internasional bersertifikasi. Kami punya program beasiswa D-3 tenaga penyuluh lapangan untuk industri kecil dan menengah dipersiapkan sebagai wirausaha. Kami memiliki program Diklat penumbuhan kewirausahaan dan bekerjasama dengan asosiasi pengusaha-pengusahanya termasuk pengusaha tekstil. Kemenperin telah bekerjasama dengan BNSP.

Kami sudah mengadakan Diklat Asesor Kompetensi. Kami sudah menyusun SKKNI dalam berbagai bidang."

Dari Dirjen Kementerian Pertanian mengatakan: "Sekjen kami sudah menyusun kegiatan kami. Kementan hanya terkait 3 Pilar. Nanti akan kami tambahkan Data Kuantitatif-nya. Kami perlu *round* berikutnya untuk memaparkan detail-detail baru yang sudah kami sempurnakan."

Berikutnya dari Dirjen BNSP menajamkan kembali paparannya. "Kompetensi ini lebih memperjelas kebutuhan. Sekarang masih dilihat lowongan pekerjaan berbunyi "*dibutuhkan tenaga SLTA atau sederajat*". Kalau sudah ada standar kompetensi yang jelas dan *demand driven*, maka nanti lowongan pekerjaan akan berbunyi "*dibutuhkan tenaga yang sudah lulus uji kompetensi untuk bidang....*".

Rakor 19 Juni 2012

Pada Rakor 19 Juni 2012 bertempat di Auditorium Setwapres sebagai *followup* Rakorsebelumnya giliran pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menyampaikan beberapa hal antara lain menyangkut Keminfo itu sendiri yang telah menjalankan program memfasilitasi sertifikasi keamanan jaringan Internet, operator radio maritim, program e-literasi, internet untuk daerah terpencil dan pasca konflik. Standarisasi Auditor IT dan Animasi. Juga bahwa Keminfo telah memiliki 2 pusat pelatihan terpadu di Cikarang dan Ciputat. Juga memiliki program lain di luar operator radio dan keamanan Internet.

Ia juga menambahkan, untuk pengembangan kewirausahaan sebagian besar UKM belum memakai Internet.



Selanjutnya dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melihat bahwa sebenarnya BPS sudah melakukan pendataan. "Kami punya data UKM, tiap tahun bertambah. Kami punya 55,3 juta sekian UKM. Tetapi dua tahun sebelumnya, 52,3 juta. Artinya tiap tahun tercipta usaha baru. Saya melihat ini identik dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mestinya telah mampu mengurangi beban kita dari aspek pengurangan pengangguran dan lapangan kerja."

Dalam konteks itu Bambang Widianto menegaskan APBN itu tidak 20 persen dari seluruh kegiatan ekonomi Indonesia. "Jangan sampai dikesankan bahwa semua pertumbuhan itu adalah hasil kerja kita. Sebetulnya kontribusi pemerintah 20 persen, justru kita harus meng-*encourage* yang 80 persen lagi."

Prof. Bejo Suyanto dari Dikbud menyampaikan paparannya lebih fokus pada menciptakan

tenaga kerja yang nantinya akan membuka lapangan kerja. Dan ditambahkan Taufik dari Dikbud secara detail mengenai prioritas Pembangunan Nasional, Kebijakan Penyelarasan Pendidikan dan Pekerjaan serta mensinkronkan *supply* dan *demand*, Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pembangunan Infrastruktur, Percepatan penyerapan DIPA Belanja Modal dan Barang.

"Belanja barang bagi kami termasuk dalam pemberian beasiswa dan sebagainya. Kami punya data jumlah siswa yang nanti bisa di *match*-kan. Kami punya program studi unggulan seperti Teknik Mesin, Otomotif, TI, Agrobisnis Produksi Tanaman, Produksi Pertanian dan bahkan punya data sekolahnya. Kami bisa memetakan lulusannya ke 6 koridor ekonomi. Lokasi pengembangan kemitraan SMK dengan Industri Pendukung Program MP3EI."

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan konsep

dasar fokus kementeriannya yaitu menggerakkan sentra-sentra Industri dengan pendekatan komoditas dan kewilayahan. "Di dalam bekerja kami berkonsolidasi dengan Kemendikbud sebagai *supply* dan Kemenakertrans sebagai *demand*, sehingga muncul keperluan-keperluan sertifikasi pelatihan, sertifikasi peserta diklat, standar minimum pelayanan diklat, pendampingan penyuluhan pasca diklat, *sharing* sarana prasarana BLK dan SMK, kemudian sinergi peningkatan kapasitas tenaga pendidikan, pelatih serta instruktur."

Ia menambahkan, "Kami akan menciptakan *Pool of Master Trainers* yang bisa digerakkan melalui sentra-sentra tadi. Kami mempunyai kegiatan di 5 pilar, yang pertama perbaikan layanan dan informasi ketenagakerjaan. Misalnya layanan rekomendasi tenaga kerja asing kelautan secara *online*. Kerjasama mulai dari segi pencatatan tenaga kerja

asing dan tenaga kerja Indonesia di negara asing. Kami juga sudah mengkoneksikan agen-agen di luar negeri dengan tenaga kerja di dalam negeri. Kami sudah punya forum keterampilan untuk pencapaian SKKNI. Kami sudah punya 11 SKKNI. Kami sudah punya juga lembaga sertifikasi profesi. Ada *center of excellence* dan binaan. Kami sedang mengembangkan *bergaining agreement* perjanjian kerja laut. Terutama untuk membantu nelayan-nelayan kita yang melewati batas laut agar bisa membaca peta supaya tidak masuk ke wilayah negara lain. Kami sudah mengembangkan SMK dan Balai yang terletak di 5 sentra terluar. Kami juga mengembangkan kursus-kursus masyarakat, ada 171 kelompok sekarang, nanti akan diberi anggaran untuk pelatihan dan sebagainya."

Dari Kementerian Koperasi dalam menyampaikan paparan Menteri-nya, dia buka dengan fakta adanya jumlah Koperasi, jumlah anggota Koperasi, jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi.

"Ini memang tak terkait dalam program kementerian koperasinya, tetapi kami sendiri juga sudah menciptakan lapangan kerja. Ini gambaran mengenai UMKM berdasarkan UU 20 2008 seperti yang kami gambarkan, ada peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Kami mengutip data BPS, bahwa memang ada peningkatan usaha kecil dan menengah."

Dalam paparannya ia menyampaikan juga program-program implementasi 4 kebijakan itu yang berhubungan dengan program memfasilitasi sekolah kejuruan yang tidak mampu dan terabaikan. Selain itu usahakan untuk dapat mengakses peralatan



misalnya untuk bikin bengkel, *catering*, konveksi, membikin TPKU yaitu Tempat Proses keterampilan usaha; untuk membantu SMK-SMK yang belum mampu punya peralatan sendiri. Juga memiliki program pendampingan wirusaha baru dan bantuan *start up capital*.

"Kami punya program dana bergulir PRA-KUR sudah menyalurkan 1.3 triliun. Meng-*create* 263 ribu tenaga kerja baru. Kami juga punya program revitalisasi pasar tradisional, penataan kaki 5, penataan toko koperasi ritel modern dan kantin sekolah."

Menanggapi dari Kementerian Koperasi, Bambang Widianto meminta agar sistematikanya perlu dirapikan di mana sebenarnya unsur yang mau ditampilkan sudah ada semua.

"Bapak-Bapak, Wapres kita ahli ekonomi. Kalau kita membikin program yang UKM, kadang-kadang *approach* kita terlalu ke pendekatan bantuan sosial atau *charity*. Bisakah pendekatan kita

lebih secara ekonomi? Barangkali kalau itu bisa ditonjolkan, akan lebih menjual," tegas Bambang.

Dari pemamaparan Kementerian Perindustrian diketahui kementeriaannya memiliki proyeksi industri manufaktur menurut kelompok industri, 2012-2014, juga proyeksi kebutuhan tenaga kerjanya. Termasuk mengenai peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja, bekerjasama dengan SKKNI dan lembaga sertifikasi profesi.

"Malahan kami memfasilitasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), meningkatkan jumlah *asesor* dan *master asesor*. Kami juga melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Kami menyiapkan tenaga yang kami didik di sekolah-sekolah unggulan, yang langsung terserap ke industri, bahkan yang bagus di *ijon*. Kami masih belum mampu memenuhi tuntutan dunia industri. Kami punya pengembangan industri kecil dan pengembangan industri agro. Tenaga kerja kami sangat



Pekerja bengkel

“Sebenarnya di bidang Industri sudah banyak SKKNI, tetapi TUK-nya banyak yang belum dipetakan. Ini harus bekerjasama dengan para asosiasi.”

dibutuhkan oleh dunia industri terutama industri tekstil.”

Berikut dari Kementerian Pertanian menyampaikan Pertumbuhan PDB atas harga Konstan 2000 dan penyerapan TK pertanian dan non pertanian.” Dari segi produktivitas tenaga kerja pertanian vs lain sektor, sektor kami memang rendah. Tapi pertumbuhannya cukup tinggi. Kondisi Tenaga Kerja pertanian kami akui lebih rendah produktivitasnya dari sektor lain. Akses petani ke modal, lahan dan pasar terbatas. Persepsi masyarakat: petani adalah objek pembangunan, belum jadi subjek. Petani belum diperlakukan sebagai tenaga kerja sektor lain. Ka-

mi Kementerian Pertanian mendapat tugas dari Presiden untuk meningkatkan lima komoditas pangan utama, apalagi harus surplus beras 10 juta ton. Semua swasembada di akhir 2012. Proyeksi kami serapan tenaga kerja sektor pertanian bisa mencapai 39 juta jiwa di tahun 2012-2014. Petani kita pendidikannya rendah, rata-rata di bawah SD sekitar 7 juta orang. Paling banyak buruh yang tidak dibayar. Dari lima pilar, kami terjemahkan dalam tiga kebijakan: Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Pengembangan produk dan pengembangan Pasar, dan pembangunan infrastruktur pertanian. Tiga kebijakan kami terjemahkan dalam program-program SDM aparatur pertanian, diklat-diklat *leadership*, *admin*, fungsional dan teknis. Non aparatur termasuk kewirausahaan, teknis, peningkatan nilai tambah dan magang. Kami juga membuat sekolah lapangan tanaman pangan dan hortikultura terpadu. Ini semua demi pencapaian

surplus 10 juta ton beras. Kami sudah memfasilitasi lembaga sertifikasi profesi, fasilitasi asesor kompetensi dan lembaga diklat profesi uji kompetensi demi tercapainya SKKNI pertanian. Kami memprogramkan peningkatan mutu pendidikan kejuruan pertanian di 70 SMK-SPP. Program lain yang sudah dikelola antara lain Pembangunan Kelembagaan dan Penguatan Modal Petani, dilaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis pedesaan. Juga pengelolaan produk dan pengembangan pasar, kami lakukan pengembangan pasar di 32 kabupaten Kota. Kami mengupayakan perluasan areal pertanian dan perbaikan infrastruktur. Hal-hal yang perlu dilaksanakan termasuk meningkatkan Indeks Nilai Tukar Petani di atas 105.”

Dari Ditjen Binapenta menyampaikan program-programnya yang terkait pilar rencana aksi penciptaan lapangan kerja.

“Pilar 1 kami sudah terstandarisasi ISO 9001. Kami sudah menyediakan bursa kerja *online* di daerah, dan petugas pengantar kerja sudah kami tingkatkan kualitas kemampuannya. Kami memperkuat sistem informasi pasar kerja. Kami sudah kembangkan sistem aplikasi lowongan kerja dari media cetak. Kami bekerjasama dengan JICA untuk pelayanan *Public Employment Services*. Kami juga mengembangkan sistem analisis pasar kerja dan melaksanakan *job fair* sebagai penyebaran informasi pasar kerja kepada masyarakat. Kami akan laksanakan di 33 provinsi. Kami laksanakan Monev dengan melibatkan *stakeholders*. Kami bahkan memiliki program darurat penciptaan lapangan kerja untuk kondisi bencana, termasuk rehab infrastruktur.



Kemudian dilanjutkan dari Binalantas bahwa lembaganya siap menangani hal-hal sesuai dengan pilar-pilar rencana aksi. "Kami melakukan optimalisasi kios 3 in 1 yaitu pelatihan, sertifikasi, penempatan. Kami mengupayakan harmonisasi regulasi, serta program pelatihan berbasis pasar kerja. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan, juga kapasitas instruktur dan tenaga pelatihan. Ini semua termasuk peningkatan sarana pelatihan, pengembangan *network* kemitraan, dibantu pelatihan dan *upgrading* untuk para instruktur. Kami sudah berorientasi ke standar kompetensi, target 2012 akan kami latih 1012 orang. Untuk program darurat lapangan kerja ada dua program yaitu bantuan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan."

Selanjutnya dari BNSP menyampaikan presentasi terkait

sertifikasi kompetensi. Keterlibatan BNSP adalah pada Pilar 2 yaitu peningkatan ketrampilan dan kapasitas angkatan kerja. "Kami Proyeksikan harus ada 5 juta tenaga kerja tersertifikasi. Tetapi kami juga harus menambah jumlah *asesor*, *master asesor* dan *lead asesor*."

Tetapi tenaga *asesor* harus berada dalam payung LSP sedangkan ketersebaran LSP sangat menentukan. Kalau LSP masih kurang akan ada hambatan, dan belum punya TUK. Kami sedang menggandeng Pemda agar kami bisa membangun LSP-LSP di semua provinsi, sesuai industri andalannya. Untuk penguatan lembaga BNSP diharapkan ada revisi PP 23/2004 agar pengelolaan anggaran ada sendiri untuk BNSP."

Terakhir dari BNP2TKI menyampaikan bahwa ada 3 Pilar yang tengah dijalankan. "Kami

"Kami juga membina kelompok pengawas perbatasan. Kita punya program Pilar 5 yaitu sekolah untuk nelayan. Agar anak-anak mereka bersekolah dulu, baru jadi nelayan."

sudah membuat info kerja *online*, mempersiapkan peningkatan kualitas CTKI lewat lembaga pelatihan. Kami berdayakan TKI purna untuk mengedukasi keuangan dan remitansi. Kami perlu dukungan untuk kebutuhan seperti pemetaan potensi CTKI, peningkatan peran perwakilan RI dalam *Market Intelligence*, dukungan lembaga pelatihan, dukungan lembaga sertifikasi, kemudahan akses kredit dan pemberdayaan TKI," tegasnya.

■ Lukman Ajis Salendra

Ketenagakerjaan, Semua Telah Berubah, Tuan?

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) dengan tegas menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat tersebut memberi petunjuk tentang hak warga negara yang sekaligus memancarkan asas keadilan dan kerakyatan. Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada masa lampau masalah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah perburuhan. Dalam masa sebelum Orde Baru kaum buruh umumnya menjadi

sasaran perebutan pengaruh partai politik, khususnya partai politik berhaluan kiri. Pada tahun 1947, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, tentang tugas pokok Kementerian Perburuhan,

permasalahan perburuhan telah diupayakan untuk ditangani dengan menyelenggarakan urusan perlindungan tenaga buruh dan kesempatan kerja, jaminan sosial, perselisihan perburuhan,

organisasi perburuhan, perwakilan perburuhan, pemberian pekerjaan dan upaya mengatasi pengangguran dan sebagainya. Namun perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan tidak memungkinkan terlaksananya berbagai keinginan tersebut.

Dalam periode selanjutnya, yaitu periode tahun 1950-1959 yang dikenal sebagai periode demokrasi liberal, diupayakan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan dan program di bidang perburuhan, meliputi pengaturan hubungan dan pengawasan perburuhan, pemberian pekerjaan bagi para pencari kerja, serta pelatihan kerja. Pada masa itu masalah perburuhan diwarnai perkembangan politik dengan partai-partai yang jumlahnya banyak dan masing-masing berebut mencari pengaruh. Pemerintahan yang berganti-ganti tidak memungkinkan dikembangkan dan dilaksanakannya kebijaksanaan ketenagakerjaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada periode demokrasi terpimpin antara tahun 1959-1966, masalah perburuhan makin diwarnai oleh perkembangan politik yang bertambah tajam. Organisasi buruh bukan lagi menjadi organisasi yang berjuang untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya, tetapi telah makin menjadi alat perjuangan partai politik. Kesejahteraan buruh makin terabaikan dan dikalahkan oleh kepentingan politik. Akhirnya sebagian kaum buruh Indonesia terpengaruh oleh ideologi komunis dan digunakan oleh kaum komunis sebagai masanya sampai kepada usaha kudeta dan pemberontakan G-30-S/PKI.

Pada masa Orde Baru disepakati untuk mengganti istilah

buruh dengan pekerja karena istilah pekerja tidak mengandung pengertian eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya, tetapi merupakan mitra kerja dalam proses produksi yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1969, pengaturan ketenagakerjaan mulai diarahkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Dengan Orde Baru, dimulai penataan kembali kehidupan politik dan semua aspek kehidupan lainnya termasuk ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan pada awal PJP I dihadapkan pada masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Penyebaran penduduk dan angkatan kerja juga, tidak merata, dengan kepadatan tinggi penduduk di daerah tertentu dan kelebihan tenaga kerja pada sektor dan daerah tertentu khususnya di Jawa dan kekurangan penduduk serta tenaga kerja di daerah

lainnya. Terbatasnya daya serap sektor pertanian di daerah pedesaan telah menyebabkan pula mengalirnya arus tenaga kerja dari desa ke kota yang tidak dapat diimbangi dengan tersedianya kesempatan kerja.

Dengan memperhatikan kondisi yang demikian, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara bertahap dan berencana seiring dengan kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang telah membuka kesempatan kerja baru. Pada tahun 1971, jumlah angkatan kerja adalah 41,3 juta orang, dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 73,9 juta orang atau bertambah sebesar 32,6 juta orang. Pembangunan di berbagai sektor selama PJP I telah menciptakan lapangan kerja yang dapat mengimbangi pertambahan angkatan kerja. Dalam periode tersebut, jumlah pekerja yaitu angkatan kerja yang bekerja, bertambah sebesar 34,0 juta orang yaitu dari sebesar 37,6 juta orang pada tahun 1971 menjadi 71,6 juta



Kegiatan wirausaha



orang pada tahun 1990.

Struktur lapangan kerja juga telah berubah ditandai dengan pergeseran dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian khususnya sektor industri dan jasa dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Pada tahun 1971, persentase pekerja di sektor pertanian adalah sebesar 66,3 persen dan di sektor industri dan jasa sebesar 33,7 persen dari jumlah seluruh pekerja. Pada tahun 1990, tenaga kerja di sektor pertanian menurun

menjadi 49,9 persen dan sektor industri dan jasa meningkat menjadi 50,1 persen. Perubahan struktural ini menghasilkan peningkatan produktivitas pekerja Indonesia. Berdasarkan harga konstan 1983, kemampuan pekerja menghasilkan barang dan jasa meningkat dari Rp 967 ribu pada tahun 1971 menjadi Rp 1.608 ribu pada tahun 1990, atau produktivitas rata-rata per pekerja meningkat sekitar 2,7 persen per tahun dalam masa itu. Dengan meningkatnya produktivitas, terjadi pula peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan yang padat penduduk, dilaksanakan kegiatan yang mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya. Dengan sistem ini selama PJP I, telah didayagunakan tenaga kerja sebanyak 13,4 juta orang. Guna mengurangi pengangguran tenaga kerja terdidik sekaligus membantu pengembangan daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli, terutama di daerah pedesaan, dihimpun tenaga kerja sukarela sarjana yang bernaung di bawah badan urusan tenaga kerja sukarela Indonesia (TKS-BUTSI). Sejak Repelita V, TKS-BUTSI diubah menjadi tenaga kerja sukarela terdidik (TKST). Selama PJP I, tenaga kerja sukarela yang telah ditugaskan berjumlah 42.046 orang tersebar di 27 propinsi, khususnya di pedesaan.

Upaya penyebaran tenaga kerja ke daerah, dikembangkan juga melalui kegiatan antarkerja antardaerah (AKAD). Selama PJP I, melalui mekanisme AKAD ditempatkan sebanyak 459,2 ribu orang. Melalui mekanisme antarkerja lokal (AKL) ditempatkan sebanyak 2,5 juta orang. Dalam

rangka pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dilakukan kegiatan antarkerja antarnegara (AKAN), yang telah menyalurkan sebanyak 1,0 juta orang.

Peningkatan mutu tenaga kerja diupayakan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja, antara lain dalam balai-balai latihan kerja (BLK) dan melalui kursus-kursus latihan kerja (KLK). Selama PJP I, tenaga kerja yang dilatih di BLK/KLK berjumlah 1.456.516 orang terdiri dari 601.243 orang atau 41,3 persen di bidang industri, 85.889 orang atau 5,9 persen di bidang pertanian, 238.877 orang atau 16,4 persen di bidang manajemen, dan sisanya 530.507 orang atau 36,4 persen dilatih di berbagai bidang kejuruan melalui pelatihan keliling/mobile training unit (MTU).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja ditetapkan upah minimum regional yang ditinjau secara berkala. Selama PJP I, ditetapkan sebanyak 28 upah minimum regional, 65 upah minimum sektoral, dan 427 upah minimum subsektoral. Upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja ditempuh pula melalui jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Selama PJP I, peserta Jamsostek mencapai 46,5 ribu perusahaan dan mencakup lebih dari 5,8 juta tenaga kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam PJP I merupakan modal dan menjadi landasan yang kuat untuk dilanjutkan dan ditingkatkan dalam PJP II, yang dimulai dengan Repelita VI.

Pada Era Reformasi pergantian Presiden dari mulai Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan kemudian Susilo Bambang Yudoyono, masalah ketenagakerjaan terus dibenahi baik dari segi kebijakan maupun terkait program meskipun masih

banyak terdapatnya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Pada Era Reformasi masalah ketenagakerjaan seiring dengan usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Selanjutnya era reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-

Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global,



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pabrik perakitan elektronik

Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Menurut Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi RI di mana dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tertuang bahwa pada kurun waktu 2005-2025 pembangunan

hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2010-2025 ini adalah:

1) Mewujudkan aspek keberlanjutan (*continuity*) dan

kesinambungan (*sustainability*) pembangunan jangka menengah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam perspektif jangka panjang;

- 2) Mendukung koordinasi antar pelaku (*stakeholder*) pembangunan dalam pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; dan

kerja serta pengupahan yang rendah dan perlindungan tenaga kerja.

Maka dalam konteks itu pemerintah telah mengeluarkan Permenakertrans RI Nomor PER. 16/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro serta Permenakertrans RI Nomor PER. 17/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Dalam rangka mengemban kedua Permenakertrans tersebut,

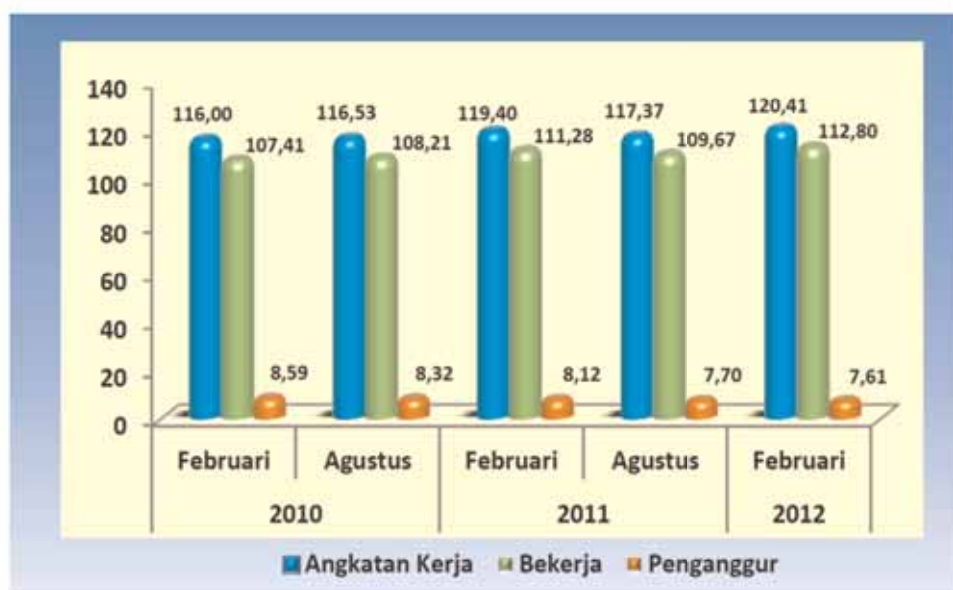
penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota, Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan pelaksanaan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan melalui Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selain itu akan didorong untuk penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Negara, Perencanaan Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Daerah, Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta, dan Perencanaan Tenaga Kerja Lembaga Swasta lainnya.

Guna mewujudkan amanah yang diberikan dan dibebankan pada Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, maka agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana Strategis Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2010 - 2014 dalam masa bakti kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per 03/MEN/I/2010, bahwa setiap Unit Eselon I dan II di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I. dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I.

Tujuan Renstra Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2010-2014 yaitu:

- 1) Terumuskannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program serta kegiatan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja kurun waktu 2010-2014 untuk mendukung

Grafik Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2010–2012 (juta orang)



- 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar unit kerja di pusat, maupun dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di daerah.

Berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini menyangkut masalah pengangguran dan setengah pengangguran, produktivitas tenaga kerja yang rendah, kualitas yang rendah, perselisihan kerja dan pemogokan

melalui Permenakertrans RI Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pemberian bimbingan teknis, penyusunan, pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kerja. Perwujudan dari itu semua adalah penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, mendorong



sebagian tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yaitu perencanaan tenaga kerja;

- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan strategik guna merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.

Sasarannya yaitu demi meningkatnya kinerja Pusat Perencanaan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dan manfaatnya: 1) Sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Perencanaan Tenaga Kerja melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program serta kegiatan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja kurun waktu 2010- 2014; dan 2) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi/lembaga pemerintahan dan masyarakat pemangku kepentingan.

Keadaan Ketenagakerjaan

Melihat kenyataan dan perubahan ketenagakerjaan itu terus secara berkesinambungan dari periode ke periode, dari kurun waktu tertentu, sedianya dapat diamati atau diteropong dari fakta hari ini sebagaimana dalam grafik berikut: (*Grafik Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2010–2012 (juta orang)*)

Menurut Sumber Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Edisi 24 Mei 2012, dinyatakan bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80

persen.

Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011.

Selama setahun terakhir (Februari 2011-Februari 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Perdagangan sekitar 780 ribu orang (3,36 persen), serta

pada Februari 2012, sebesar 77,2 juta orang (68,48 persen) bekerja 35 jam ke atas per minggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 per minggu mencapai 6,9 juta orang (6,08 persen).

Pada Februari 2012, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77 persen) dan pekerja dengan pendidikan universitas hanya sebesar 7,2 juta orang (6,43 persen).

Pada february 2012, tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,32 persen. Sedangkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2012 menunjukkan adanya perbaikan

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2010–2012 (juta orang)

Jenis Kegiatan Utama	2010		2011 ¹⁾		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	116,00	116,53	119,40	117,37	120,41
Bekerja	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80
Penganggur	8,59	8,32	8,12	7,70	7,61
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,83	67,72	69,96	68,34	69,66
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,41	7,14	6,80	6,56	6,32
4. Pekerja tidak penuh	32,80	33,27	34,19	34,59	35,55
Setengah penganggur	15,27	15,26	15,73	13,52	14,87
Paruh waktu	17,53	18,01	18,46	21,06	20,68

¹⁾ sejak tahun 2011 menggunakan penimbang penduduk berdasarkan hasil SP2010 (final)

Sektor Keuangan sebesar 720 ribu orang (34,95 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian 1,3 juta orang (3,01 persen) dan Sektor Transportasi, Perdagangan, dan Komunikasi sebesar 380 ribu orang (6,81 persen).

Berdasarkan jumlah jam kerja

yang digambarkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 bertambah sebesar 3,0 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011 dan bertambah 1,0 juta orang

Tabel 2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2010–2012
(juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,83	41,49	42,48	39,33	41,20
Industri	13,05	13,82	13,70	14,54	14,21
Konstruksi	4,84	5,50	5,59	6,34	6,10
Perdagangan	22,21	22,49	23,24	23,40	24,02
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,82	5,62	5,58	5,08	5,20
Keuangan	1,64	1,74	2,06	2,63	2,78
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,96	17,02	16,65	17,37
Lainnya *)	1,40	1,50	1,61	1,70	1,92
Jumlah	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

*) Lapangan pekerjaan utama/aktor lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air

dibanding keadaan Februari 2011. Penduduk yang bekerja pada Februari 2012 bertambah sebesar 3,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011 dan bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2011). Sementara, jumlah penganggur pada Februari 2012 mengalami penurunan sekitar 90 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2011 dan mengalami penurunan sebesar 510 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2011.

Meskipun jumlah angkatan kerja bertambah, tetapi dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,30 persen poin. (Lihat Tabel 1)

Sementara itu sumber Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XV, 7 Mei 2012 menyebutkan bahwa penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan umum secara struktur hingga Februari 2012 tidak mengalami perubahan, dimana sektor Pertanian, Perdagangan,

Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Pertanian sebesar 1,9 juta orang (4,75 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 720 ribu orang (4,32 persen), serta Sektor Perdagangan sekitar 620 ribu orang (2,65 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Industri sebesar 330 ribu orang (2,27 persen) dan Sektor Konstruksi sebesar 240 ribu orang (3,78 persen). Sementara, jika dibandingkan dengan Februari 2011 hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 3,01 persen dan 6,81 persen. (Lihat Tabel 2)

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2012 sekitar 42,1 juta orang (37,29 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,7 juta orang (62,71 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Dalam setahun terakhir (Februari 2011–Februari 2012), pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah 340 ribu orang dan pekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebesar 3,6 juta orang.

Tabel 3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama, 2010–2012
(juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	20,46	21,03	21,15	19,41	19,54
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	21,92	21,68	21,31	19,66	20,37
Berusaha dibantu buruh tetap	3,02	3,26	3,59	3,72	3,93
Buruh/Karyawan	30,72	32,52	34,51	37,77	38,13
Pekerja bebas di pertanian	6,32	5,82	5,58	5,48	5,36
Pekerja bebas di nonpertanian	5,28	5,13	5,16	5,64	5,97
Pekerja keluarga/tak dibayar	19,68	18,77	19,98	17,99	19,50
Jumlah	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

Peningkatan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sebesar 4,0 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 34,24 persen pada Februari 2011 menjadi 37,29 persen pada Februari 2012. Komponen pekerja informal terdiri dari pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2011-Februari 2012), pekerja informal berkurang sebesar 2,4 juta orang dan persentase pekerja informal berkurang dari 65,76 persen pada Februari 2011 menjadi 62,71 persen pada Februari 2012. Penurunan ini berasal dari hampir seluruh komponen pekerja informal, kecuali pekerja bebas di nonpertanian. (Lihat Tabel 3)

Secara umum, komposisi jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja per minggu tidak mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu pekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu pada Februari 2012 jumlahnya mencapai 77,2 juta orang (68,48 persen). Namun dalam setahun terakhir pekerja tidak penuh meningkat 1,36 juta orang (3,98 persen) dan hingga Februari 2012 masih terdapat 6,9 juta (6,08 persen) pekerja yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu. (Lihat Tabel 4)

Sedangkan, penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2012 yang masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah 55,5 juta orang (49,21 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 20,3 juta (17,99 persen). Pekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 10,3 juta orang mencakup 3,1 juta orang

Tabel 4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu, 2010–2012 (juta orang)

Jumlah Jam Kerja per Minggu	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1–7	1,48	1,20	1,37	1,44	1,55
8–14	4,81	4,59	4,79	5,20	5,31
15–24	11,97	12,48	12,63	12,89	12,67
25–34	14,54	15,00	15,40	15,06	16,02
1–34	32,80	33,27	34,19	34,59	35,55
35+ *)	74,60	74,94	77,09	75,08	77,25
Jumlah	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

*) Termasuk sementara tidak bekerja

Tabel 5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010–2012 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Ke Bawah	55,31	54,51	55,12	54,18	55,51
Sekolah Menengah Pertama	20,30	20,63	21,22	20,70	20,29
Sekolah Menengah Atas	15,63	15,92	16,35	17,11	17,20
Sekolah Menengah Kejuruan	8,34	8,88	9,73	8,86	9,43
Diploma (I/II/III)	2,89	3,02	3,32	3,17	3,12
Universitas	4,94	5,25	5,54	5,65	7,25
Jumlah	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

(2,77 persen) berpendidikan diploma dan 7,2 juta orang (6,43 persen) berpendidikan universitas. Perbaikan kualitas pekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya pekerja berpendidikan rendah (SMP kebawah) dan meningkatnya pekerja berpendidikan tinggi (diploma dan universitas). Dalam setahun terakhir, pekerja berpendidikan rendah menurun

dari 76,3 juta orang (68,60 persen) pada Februari 2011 menjadi 75,8 juta orang (67,20 persen) pada Februari 2012. Sementara, pekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 8,9 juta orang (7,96 persen) pada Februari 2011 menjadi 10,3 juta orang (9,19 persen) pada Februari 2012. (Lihat Tabel 4)

Jumlah pengangguran pada Februari 2012 mencapai 7,6 juta orang, dengan Tingkat

Tabel 6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010–2012 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Ke Bawah	3,71	3,81	3,37	3,56	3,69
Sekolah Menengah Pertama	7,55	7,45	7,83	8,37	7,80
Sekolah Menengah Atas	11,90	11,90	12,17	10,66	10,34
Sekolah Menengah Kejuruan	13,81	11,87	10,00	10,43	9,51
Diploma I/II/III	15,71	12,78	11,59	7,16	7,50
Universitas	14,24	11,92	9,95	8,02	6,95
Jumlah	7,41	7,14	6,80	6,56	6,32

Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen turun dari TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011 sebesar 6,80 persen. Pada Februari 2012, TPT untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi tertinggi, yaitu TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 10,34 persen dan

TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,51 persen. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2011, TPT pada hampir semua tingkat pendidikan cenderung turun, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan SD kebawah naik 0,13 persen poin dan TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III naik 0,34 persen poin seperti tergambar dalam tabel berikut:



Pekerja konstruksi

(Lihat Tabel 6).

Layanan Ketenagakerjaan

Dalam konteks perubahan, salah satu yang dijadikan sebagai *mainstream* pemerintah saat ini yang terkandung dalam Depnakertrans yakni mengelola tiga program utama seperti dikemukakan pada Rapat Koordinasi yang dipimpin Bambang Widianto, 21 Mei 2012 di Sekretariat Wakil Presiden. Bahwa ada tiga program utama yang penting terkait dengan layanan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja terutama melalui Dirjen Binapenta dengan beberapa pekerjaan terkait Dirjen Binalantas. *Pertama*, meningkatkan kualitas layanan fasilitasi kerja. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan akses informasi pasar tenaga kerja. *Ketiga*, Membangun sistem informasi pasar kerja dan kebutuhan permintaan.

Alasan untuk melakukan perubahan program di mana saat ini ada kesenjangan yang signifikan dalam layanan pekerjaan yang diberikan; kualitas informasi mengenai pasar tenaga kerja yang tidak memadai sehingga mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan ketenagakerjaan oleh pengusaha dan pencari kerja. Lebih dari dua juta pekerja memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Oleh sebab itu, dibutuhkan layanan ketenagakerjaan yang berkualitas tinggi dan efektif untuk mendukung pemerintah untuk mencapai target pengurangan pengangguran lima sampai enam persen.

Maka dari itu sebagaimana yang mengemuka dalam Rakor 21 Mei 2012, ada proses untuk melaksanakan tindakan yang tujuannya adalah meningkatkan hasil dari layanan ketenagakerjaan pemerintah dengan mengatasi



Pekerjaan padat karya di perdesaan

Alasan untuk melakukan perubahan program di mana saat ini ada kesenjangan yang signifikan dalam layanan pekerjaan yang diberikan; kualitas informasi mengenai pasar tenaga kerja yang tidak memadai sehingga mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan ketenagakerjaan oleh pengusaha dan pencari kerja.

semua kesulitan. Proses untuk tindakan didasarkan pada pengalaman internasional yang penyajiannya termaktub dalam tiga bagian:

- 1) Peningkatan keterlibatan industri dalam desain dan implementasi layanan pekerjaan;
- 2) menilai kinerja program yang ada untuk mengidentifikasi reformasi yang diperlukan dan sumber daya yang diperlukan; dan
- 3) pengembangan sistem informasi pasar tenaga kerja standar dengan mekanisme umpan balik dari *stakeholder*.

Hal lain yang diungkapkan pada Rakor itu mengenai perlunya standar kompetensi serta sertifikasi profesi yang terkait dengan:

- 1) Meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyusunan SKKNI; dan
- 2) Memperbaiki sistem sertifikasi kompetensi.

Dalam konteks perubahan, sampai hari ini pun Pemerintah terus berupaya bagaimana membenahi program-program terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Salah satunya yang dirumuskan Rakor

24 Mei 2012 terus 5 Juni 2012 dan 19 Juni 2012 untuk menghasilkan bahan rencana aksi yang akan dipresentasikan di depan Wapres di mana program dari setiap kementerian dan lembaga harus terkait dengan 5 Pilar Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja, yaitu

- 1) Informasi dan layanan ketenagakerjaan;
- 2) Peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja;
- 3) Pengembangan UMKM;
- 4) Program padat karya dan infrastruktur; dan
- 5) Program darurat penciptaan lapangan kerja.

Lukman Ajis Salendra/dbs



Rendevouz

Budidaya Si Buah Cinta yang Good Looking



Buah cinta ini bernama strawberry atau stroberi. Termasuk buah yang “good looking” alias sedap dipandang mata. Bentuknya unik, persis seperti bentuk hati. Warna buahnya bila sudah matang merah merona. Rasanya berkualitas tinggi; cita rasanya asam segar. Tak heran kalau strawberry dipakai juga untuk perasa tambahan selain cokelat, baik itu untuk es krim, sirup, maupun untuk kue-kuean.



Strawberry menjadi primadona sejak jaman Yunani klasik sampai kini. Bahkan dalam sejarah Yunani kuno buah strawberry secara resmi menjadi lambang Dewi Cinta. Keindahan cinta kala itu dilambangkan oleh warna, rasa, dan kesegaran buah strawberry. Dari segi fisik, buah strawberry terkesan feminin, cantik, menggiurkan, menggoda, sensual, sensitif dan manis, seperti layaknya seorang wanita yang penuh pesona.

Secara historis, buah khas strawberry ini berasal dari Amerika dan dikembangkan dengan baik di daerah Amerika Utara untuk jenis *Fragaria Virginiana*

yang terkenal akan rasanya dan Amerika Selatan, Chile untuk jenis *Fragaria Chiloensis* untuk ukuran besarnya. Nama *Fragaria* diambil dari kata “Fragans” yang artinya harum yang merujuk dari bau harum buah strawberry.

Asal-usul kata strawberry secara etimologis antara lain; dari kegiatan tukang kebun dengan menggunakan sedotan “straw” untuk menanam buah ini dan melindungi dari proses pembusukan (suatu pseudoetymology yang dapat ditemukan di dalam sumber non-linguistic seperti Old Farmer Almanac) atau juga dapat berasal dari jaman Anglo-Saxon di mana kata kerja untuk menaburkan

“Strew” (artinya untuk menyebar di sekelilingnya) yang adalah “Streabergen” (kata “Strea” berarti “menaburkan” dan kata “Bergen” berarti biji atau buah). Kemudian streberie, straiberie, strauberie, straubery, strauberry, dan akhirnya menjadi “Strawberry”. Nama strawberry diduga kuat berdasarkan faktanya bahwa bibit atau biji dari buah ini ditaburkan (Strewn) sepanjang tanah. Ada juga yang mengatakan nama strawberry berasal dari bahasa Inggris kuno streawberige yang merupakan gabungan dari streaw atau “straw” dan berige atau “berry”. Tapi alasan pemberian nama ini masih tidak begitu jelas.

Jaman dulu, strawberry disajikan pada acara-acara negara abad pertengahan, yang melambangkan kemakmuran, perdamaian, dan kesempurnaan. Indian Amerika diduga pertama kali membuat kue dari strawberry. Adapun strawberry yang sering ditemukan di pasar swalayan merupakan jenis hibrida yang dihasilkan dari persilangan *F. virginiana* L. var Duchesne asal Amerika Utara dengan *F. chiloensis* L. var Duchesne asal Chili. Persilangan itu menghasilkan hibrid yang merupakan strawberry modern (komersil) *Fragaria x annanassa* var Duchesne. Strawberry atau





stroberi merupakan tanaman umum dari genus *Fragaria* yang dibudidayakan di seluruh dunia.

Strawberry mulai di kenal di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an. Strawberry yang memerlukan temperatur rendah untuk tumbuh dengan baik sangat cocok dengan daerah Rancabali, Bandung. Strawberry yang banyak ditanam penduduk adalah *Fragaria Nilgerrensis* yang oleh warga setempat lebih dikenal dengan Strawberry Nyodo. Strawberry juga mulai dibudidayakan di daerah Tawangmangu Kabupaten Karang Anyar, Ciwidey, Sukabumi, Cipanas, Lembang, Batu dan Bedugul (Bali).

Khasiat buah strawberry menurut penelitian di antaranya untuk menyusutkan kadar kolesterol, mencegah kanker, mencegah Leukimia, dapat meningkatkan kekuatan otak dan menjaga penglihatan tetap jernih, mengencangkan kulit, cocok bagi pengidap diabetes, memutihkan gigi, mengatasi panas dalam, dapat menghentikan diare, sebagai obat jerawat alami.

Selain itu strawberry ternyata kaya Vitamin C, serat, rendah kalori, folat, potassium, pigmen antosianin, serta asam ellagic. Dengan mengkonsumsi delapan



buah strawberry setiap hari, maka kebutuhan Vitamin C dan serat orang dewasa sudah tercukupi. Strawberry memiliki kandungan Vitamin C sebanyak 56,7 mg per 100 gram. Dengan kandungan vitamin C-nya tersebut diyakini strawberry mampu mengurangi resiko terserang penyakit kanker hingga 37 persen seperti yang dirilis *The Iowa Women's Health Study*, selain itu strawberry juga diyakini mampu mencegah kanker payudara dan leher rahim.

Budidaya Buah Cinta

Budidaya si buah cinta, sebetulnya gampang-gampang susah. Tanaman ini tidak terlalu

manja. Sebab tanaman ini termasuk jenis tanaman yang tumbuh sejak lama. Selain itu, bibitnya mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan. Tanaman ini, dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki suhu 18 derajat celcius ke atas. Bisa dikembangkan pada lahan pertanian terbuka dan hidroponik. Hanya saja, dalam pertanian sistem hidroponik jumlah investasi yang ditanam cukup besar. Sehingga, di Indonesia jarang petani yang berani menanam strawberry dengan sistem ini. Padahal kualitas buahnya, bila ditanam secara hidroponik lebih bagus, dan hasilnya memuaskan.

Tanaman ini dapat tumbuh subur pada dataran rendah, menengah sampai dataran tinggi. Atau mulai dari ketinggian 400 di atas permukaan laut (dpl), sampai 1.000 meter dpl. Daerah yang potensial untuk penanaman buah merambat ini, di antaranya untuk dataran rendah Subang dan sekitarnya, Bekasi, Karawang, dll. Hanya saja, untuk penanaman pada dataran rendah lebih mengintensifkan masalah pengairan.

Sedangkan untuk penanaman dataran tinggi cukup banyak seperti daerah Lembang, Bandung, Cipanas Cianjur, Garut, Gunung Dieng dan daerah lainnya. Untuk memperoleh bibit strawberry, hingga saat ini sangat mudah, karena biasanya petani yang menanam strawberry umumnya selain memproduksi buah juga memproduksi bibit secara bersamaan. Harga bibit yang dijual petani cukup bervariasi tergantung varietas, usia bibit dan bentuk *polybag*-nya.

Pembibitan yang lebih baik, dan cepat panen diambil dari pembibitan dengan sistem kultur jaringan. Sebab bibit dari cara ini, selain pertumbuhannya cukup baik juga masa menjelang panen pertama lebih singkat, bila dibandingkan dengan pembibitan dari biji. Maka tak heran bila bibit dari kultur jaringan, lebih banyak diminati petani, karena selain praktis juga efisien dalam pemeliharannya. Selain itu, relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

Persiapan lahan produksi, baik pada lahan terbuka maupun sistem hidroponik sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya yang membedakan dalam sistem kebun hidroponik, perlu membangun green house. Langkah pertama dalam pengolahan, terlebih dahulu

lahan dibersihkan dari semua tumbuhan liar. Kedua, lahan bajak bisa menggunakan cangkul secara manual atau traktor. Ketiga, untuk mensterilkan tanah setelah dicangkul lahan dialiri air sampai semua permukaan tanah terendam air. Biarkan selama satu bulan lebih. Keempat, setelah satu bulan, kemudian lahan dikeringkan kembali selanjutnya taburi kapur, maksudnya untuk mengembalikan tanah pada

selain untuk mengantisipasi hama, juga untuk meningkatkan kualitas buah.

Sedangkan kedelapan, lahan setelah selesai ditutup mulsa biarkan selama 1 – 2 Minggu agar unsur hara larut. Kesembilan, bibit siap ditanam pada mulsa yang telah dilubangi dengan jarak 25 cm x 25 cm atau 30 cm x 30 cm. Biarkan tanaman sampai usia 1 bulan. Setelah bibit mencapai usia satu bulan, baru diberi obat



tingkat normal. Kelima, buatkan bedengan dengan lebar antara 80 cm sampai 100 cm, sedangkan panjangnya tergantung kondisi tanah atau maksimal 10 meter. Keenam, pada permukaan bedengan taburkan pupuk kandang dengan perbandingan untuk satu ha minimal 20 ton, lebih banyak lebih baik. Ketujuh, bedengan yang telah diberi pupuk, kemudian disiram dan taburi dengan Urea, TSP, KCL. Setelah itu, tutup dengan mulsa plastik silver dasar hitam. Pemasangan mulsa

dan pupuk semprot dengan dosis sesuai. Masa pertumbuhan dua bulan, setelah dua bulan panen pertama bisa dilakukan.

Langkah selanjutnya tentu cara menerapkan teknik panen. Idealnya, panen dilakukan dengan memetik bagian tangkai bunga dengan kelopaknya. Di sini, tangan jangan sampai menyentuh buah. Penggunaan gunting pun sedikit riskan dilakukan, meski efektif untuk panen. Panen dilakukan dalam kurun waktu dua kali dalam satu minggu.



Untuk dapat tumbuh dengan baik tanaman strawberry mempunyai syarat tumbuh khusus, yang antara lain; strawberry merupakan tanaman subtropis yang juga baik di tanam di daerah tropis yang memiliki ketinggian tempat antara 1000-2000 m dpl; mendapatkan penyinaran matahari antara 8 - 10 jam hari; curah hujan berkisar 600-700 mm pertahun; suhu udara optimum antara 17°C - 20°C dan suhu udara minimum antara 4°C - 5°C dengan kelembaban udara 80 persen - 90 persen. Sebelum memasukan

tanah ke dalam polibag sebaiknya tanah di persiapkan dulu dengan pemupukan dasar.

Pupuk dasar ini dapat berupa UREA 20 kg + TSP 25 kg + KCl 10 kg dan pupuk kandang 2-3 untuk setiap 1000m². Pemupukan susulan biasanya dilakukan saat tanaman beumur 2 bulan. Sebelum tanaman mulai berbungga. Bunga pertama sebaiknya dibuang atau di pangkas. Karena biasanya bunga awal ini tidak berbuah secara baik. Setelah mencapai umur 4 bulan barulah bunga-bunga tersebut di pelihara agar

menjadi buah. Antara bunga dan buah masak biasanya membutuhkan waktu 1 minggu atau bahkan lebih. Tergantung ukuran buahnya.

Tanaman strawberry sebenarnya tahan serangan hama seperti halnya tanaman liar lainnya. Namun ada kemungkinan juga selama pertumbuhan tanam ini dapat terserang hama. Untuk itu sebelum terkena hama, sebaiknya dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Hama yang sering menyerang tanaman strawberry di antaranya, jamur yang menyerang buah, bunga dan daun. Cara mengatasinya dengan menyemprot obat-obatan semprot berbagai merk dan jenis yang mudah didapat di toko-toko saprotan. Hama lain di antaranya, ulat, lalat, virus daun dan lain-lain. Pengendaliannya bisa diatasi dengan pegasus dan confidor.

Akhirnya, prospek agribisnis strawberry di Indonesia cukup mencerahkan, dilihat dari daya serap pasar dan permintaan dunia dari tahun ke tahun yang meningkat. Buah cinta ini tentu saja sejatinya dilirik dunia Usaha Mikro dan Kecil karena membuka peluang bagi bisnis yang menjanjikan.

Lukman Ajis Salendra/db



Festival I La Galigo, Menghayati Kearifan Lokal

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang banyak nan eksotik. Kekayaan alam itu merupakan berkah dari Tuhan yang Maha Esa bagi kelangsungan dan kelestarian kehidupan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Hmm! Bila diberi dan ada kesempatan, tentu rasanya siapapun niscaya melakukan wisata perjalanan menikmati berbagai panorama keindahan alam Indonesia.

Di antara hamparan keindahan alam Indonesia itu adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sulawesi Selatan dengan ibukota Makasar

merupakan salah satu provinsi yang menyimpan berbagai khazanah kekayaan alam; salah satu daerah dengan potensi besar kearifan lokal. "Nenek Moyangku Orang Pelaut" adalah slogan Provinsi Sulawesi Selatan. Keindahan panorama lautan, keindahan alam pegunungan,

hasil sutera, kenikmatan kuliner, dan banyak lagi, menjadi fakta yang tak terbantahkan sejatinya Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi kekayaan dan keramahan lingkungan.

Tak boleh lupa. Di balik kekayaan alam bendawi Sulawesi Selatan itu ternyata tersimpan

khazanah non-bendawi yang luar biasa yakni hasil dari sebuah proses panjang kebudayaan dan peradaban manusia. *Sureq I La Galigo*, naskah yang mengharumkan bangsa membuka mata dunia. Sebuah mahakarya yang "paling Indonesia" sebagai karya sastra klasik. Sebuah epik yang menarasikan gambaran bagaimana rancang-bangun kebudayaan Bugis sebelum abad ke-14.

Oleh karena itu tepat sekali, ketika Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya (UNESCO) secara resmi telah mengakui naskah I La Galigo sebagai karya sastra dunia melalui pemberian anugerah *Memory of the World* dari UNESCO berupa sertifikat yang

ditandatangani Director General UNESCO, Irina Bokova. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rahman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis malam, 26 April 2012 yang diserahkan kepada Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo. Anugerah tersebut bukti penghargaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. (dikutip dari berita resmi www.sulsel.go.id)

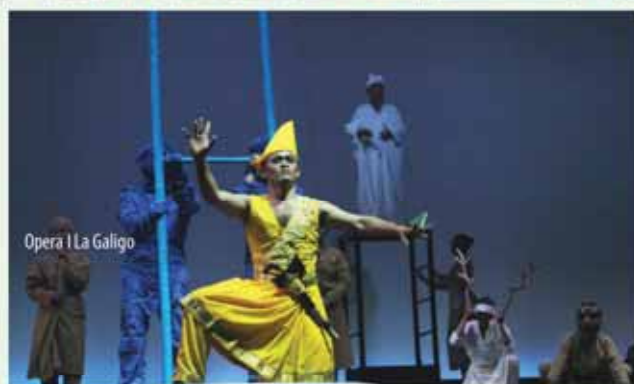
Naskah I La Galigo dalam Bahasa Bugis Kuno

I La Galigo menjadi bukti, bahwa "alam" Sulawesi Selatan ternyata tidak hanya memiliki potensi kekayaan dan keindahan secara kasat mata, tetapi juga

menyimpan khazanah budaya literasi yang tak ternilai harganya, membuka mata batin dan pikiran. I La Galigo menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat Sulawesi Selatan jauh sebelum alam modern ini sudah terlibat dalam kegiatan literasi atau budaya tulis-menulis. Naskah I La Galigo yang ditulis tangan tersebut merupakan artefak budaya yang diperkirakan ditulis di antara abad ke-13 dan ke-15 dalam bentuk puisi bahasa Bugis Kuno menggunakan huruf Lontara Kuno. Manuskripnya bisa mencapai 2851 halaman ukuran kertas folio. Epos ini disebut-sebut sebagai epos terpanjang di dunia dengan 300.000 baris lebih panjang dari Mahabarata karya Vyasa dan Ramayana karya Walmiki dari India, bahkan masih lebih panjang dari epos Yunani Homeros. *Sureq Galigo*, atau naskah I La Galigo disebut juga La Galigo adalah sebuah epik mitos penciptaan peradaban Bugis di Sulawesi Selatan.

Manuskrip I La Galigo terdapat di Museum La Galigodi Makassar, di Perpustakaan Leiden di Belanda dan di Malaysia. Selanjutnya manuskrip I La Galigo masih bisa kita jumpai pada keluarga-keluarga Bugis yang melestarikan epos tersebut. Naskah ini sekarang merupakan bagian dari koleksi naskah-naskah Indonesia dari *the Netherlands Bible Society*, yang hak permanennya diberikan ke *Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde Leiden* Perpustakaan Universitas Leiden sejak tahun 1905-1915 di Belanda.

I La Galigo merupakan epik yang menceritakan awal mula kerajaan bumi, sebuah kisah dewa-dewi yang berasal dari kerajaan langit dan kerajaan bawah air, kisah percintaan abadi, serta semua kearifan lokal yang



Keindahan panorama dan bawah laut Bulu Poloe



terkandung dalam kebudayaan Bugis klasik. Garis besar cerita epik I La Galigo menggambarkan seorang sosok tangguh, punya ketegasan hati dan pantang menyerah bernama Sawerigading, putra mahkota kerajaan Luwu. Ia digambarkan sebagai seorang yang pemberani dan pelaut yang handal. Sawerigading digambarkan sebagai tokoh manusia biasa yang kadang nakal tapi bijaksana serta pemberani, namun sisi sifat manusia sebagai makhluk lemah tetap tak dihilangkan. Pangeran Sawerigading jatuh cinta dengan saudara kembarnya yang cantik bernama We Tenriabeng. Mereka terpisah sejak terlahir ke dunia dan sudah diprediksikan akan bertemu dan saling jatuh cinta. Akhirnya entah bagaimana nasib mempertemukan mereka untuk kemudian saling jatuh cinta. Demi menghindari perkawinan sedarah, Sawerigading dipaksa

menikah dengan wanita lain. Para peneliti sastra klasik banyak yang penasaran menyingkap tokoh-tokoh dalam I La Galigo. Namun, Sureq I La Galigo (naskah I La Galigo) bukan sebatas kisah romantika percintaan. Jauh dari itu merupakan cerita tentang para dewa yang datang ke Luwu di Sulawesi Selatan dan membangun sebuah kerajaan. Kisah I La Galigo juga sering dijadikan semacam lagu pengantar tidur masa kecil di antara para keturunan kerajaan dan bangsawan Bugis yang lainnya.

I La Galigo dianggap bukanlah teks sejarah meskipun epos ini memberikan gambaran tentang kebudayaan dan peradaban orang Bugis Luwu pra-Islam. Keunikan mahakarya I La Galigo merujuk pada hasil penelitian para ahli sastra dan filologi yakni lepas dari unsur pengaruh budaya Hindu dan Budha. Bisa dikatakan I La

Galigo merupakan hasil karya asli Indonesia. Sayangnya, di tanah kelahirannya di Luwu, I La Galigo bahkan kurang populer hanya dikenal sebagai karya sastra biasa. Bahkan para pemuda di sana tidak tahu kalau I La Galigo merupakan mahakarya terpanjang di dunia.

Festival I La Galigo

I La Galigo naskah yang "hidup" sudah ratusan tahun itu ternyata memberi berkah tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Tepatnya di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pernah digelar suatu festival I La Galigo pada minggu, 22 April 2012. Event tersebut menjadi ajang silaturahmi masyarakat dan acapkali dipe rontonkan ekspresi budaya dan pertunjukan berbagai permainan tradisional. "Dengan adanya kegiatan budaya yang diselenggarakan dalam bentuk festival I La Galigo,



Aneka kegiatan budaya selama Festival I La Galigo

Paling tidak, festival I La Galigo, sebagai bukti yang menunjukkan bagaimana kegiatan budaya menjadi pakem kebudayaan yang terus berlangsung dan dilestarikan.

membuktikan bahwa aktivitas pembinaan kebudayaan di Luwu Utara berproses secara berkesinambungan,” kata Wakil Gubernur Sulsel, H. Agus Arifin Nu'mang yang membuka acara festival tersebut sebagaimana dikutip berita resmi www.sulsel.go.id.

Selanjutnya Gubernur Sulawesi Selatan tersebut dalam konteks *Visit South Sulawesi*

2012 menjelaskan bahwa festival I La Galigo dapat menjadi *core event* dan dapat menjadi magnet aktivitas kepariwisataan. Dengan banyaknya orang yang berkunjung ke daerah ini akan berdampak kepada kesejahteraan, baik pada sektor industri pariwisata seperti pengelola hotel, restoran, juga kepada pedagang kecil, sopir mobil bahkan para tukang becak sekalipun. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mendorong pembinaan terhadap sektor kebudayaan dan pariwisata, karena disadari bahwa sektor ini merupakan industri yang tidak akan pernah berhenti selama orang masih membutuhkan ketenangan batin yakni dengan cara menikmati seni budaya *travelling*, apalagi ada kecenderungan wisatawan mancanegara saat ini sangat

tertarik terhadap kehidupan yang bersifat naturalistik (*back to nature*) seperti legenda I La Galigo yang telah mendunia dan mendapatkan pengakuan internasional.

Event-event semacam festival I La Galigo yang kental nilai muatan lokalnya memang memiliki daya tarik dan punya “nilai jual” tersendiri yang dapat mengangkat citra pariwisata maupun budaya setempat.

Paling tidak, festival I La Galigo, sebagai bukti yang menunjukkan bagaimana kegiatan budaya menjadi pakem kebudayaan yang terus berlangsung dan dilestarikan. Aktivitas budaya semacam itu sejatinya dapat membangkitkan spirit untuk menghargai alam sembari menghayati nilai-nilai kearifan lokal.

■ lukman ajis salendra